**PUTUSAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM**

**TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Nomor 864/pid.sus/2023/pn-mdn)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

Oleh :

**Abdul Satar**

**22911005**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul :

Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn)

Nama : Abdul Satar

NPM : **22911005**

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**NIDN : 00291125702 NIDN: 0113028704**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul :

Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn)

Nama : Abdul Satar

NPM : **22911005**

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Sidang Penguji :

Pada Tanggal 26 April 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

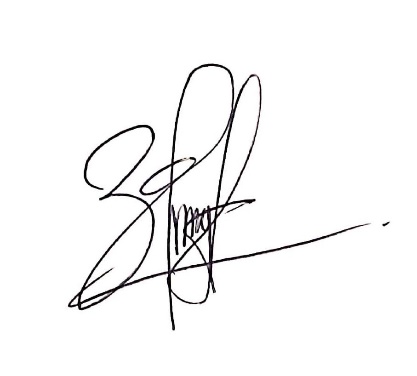
**Ketua**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

Pembimbing I Pembimbing II

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**NIDN : 00291125702 NIDN: 0113028704**

Penguji III

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN: 0029125702**

**NIDN: 0109027604**

Telah Diuji Pada:

Tanggal : 26 April 2024

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

2. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

3. Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH

**PERNYATAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Satar

NPM : **22911005**

Tempat/Tgl Lahir : Asahan, 09 Desember 1966

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Jln.Gaharu Gg. Sekolah Blok S No. 6/24

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

### **Abdul Satar**

**22911005**

**PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Satar

NPM : **22911005**

Tempat/Tgl Lahir : Asahan, 09 Desember 1966

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Jln. Gaharu Gg. Sekolah Blok S No. 6/24

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive *(Non Exclusive, Royalty Free Right)* Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul :

“Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn)”

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

### Abdul Satar

**22911005**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Satar

Alamat : Jln. Gaharu Gg. Sekolah Blok S No. 6/24

Tempat/Tgl Lahir : Asahan, 09 Desember 1966

Status : Sudah Kawin

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 8 (010090) Kisaran Tahun 1980

2. SMP Daerah Kisaran Tahun 1983

3. SMA Negeri 1 Kisaran Tahun 1986

4. Universitas Dharmawangsa Fakultas Hukum Tahun 2005

5. S.2 Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2024

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

### Abdul Satar

**22911005**

**Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara**

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**(Studi Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn)**

**ABSTRAK**

Abdul Satar

Kusbianto

Ariman Sitompul

Salah satu permasalaahn yang sering terjadi di tengah masyarakat berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi korban dan terdakwa dalam kasus KDRT. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitiaan hukum yang menitikberatkan pada data-data, penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan setiap warga Negara Indonesia dari KDRT, namun penuntut umum tidak cermat membuat surat dakwaan untuk mendakwa terdakwa sehingga dakwaan batal demi hukum dan tuntutan tidak dapat diterima. Pemidanaan KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 membutuhkan bukti tindakan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. Proses hukum melibatkan kepolisian, jaksa, dan pengadilan, dengan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum yang mencakup peraturan yang jelas, tidak bertentangan, dan stabil. Penolakan tuntutan penuntut umum didasarkan pada ketidakcermatan dalam menyusun dakwaan yang tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kecermatan dalam menyusun dakwaan dan memenuhi persyaratan hukum sangat penting untuk proses pembuktian pidana yang efektif. Hakim menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan penuntutan terhadap Terdakwa Zurrivan Pumama, S.E., M.Si. tidak dapat diterima. Putusan ini mengacu pada prinsip keadilan H.L.A Hart yang menekankan pentingnya ketepatan dalam menyusun dakwaan dan memenuhi persyaratan hukum, meski bagi korban, putusan ini mungkin dirasakan telah merusak rasa keadilannya.

**Kata Kunci : Kekerasaan Dalam Rumah Tangga, Tuntutan, Putusan**

i

**ABSTRACT**

Abdul Satar

Kusbianto

Ariman Sitompul

One of the problems that often occurs in the community is in the form of Domestic Violence (KDRT) which results in physical, sexual, psychological, and/or neglectful misery or suffering within the scope of the household. The purpose of this study was to find out how fair treatment and legal protection for victims and defendants in domestic violence cases. This research was written using normative juridical research methods, namely legal research approaches that focus on data, tracing regulations and literature related to the problem under study. The results showed that the Government was committed to protecting every Indonesian citizen from domestic violence, but the public prosecutor did not carefully produce an indictment to indict the defendant so that the charges were null and void and the charges could not be accepted. Domestic violence punishment based on Law No. 23 of 2004 requires evidence of acts of violence in the family or household, such as physical, sexual, psychological, or economic violence. Legal proceedings involve police, prosecutors, and courts, with principles of legality and legal certainty that include clear, non-conflicting, and stable regulations. The rejection of the public prosecutor's claim was based on inaccuracy in drafting charges that were not in accordance with Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Thoroughness in drafting charges and meeting legal requirements is essential for an effective criminal evidentiary process. The judge concluded that the Public Prosecutor's charges did not meet the material requirements under Article 143 paragraph (2) of the Code of Criminal Procedure, so the charges were declared null and void. The prosecution of Defendant Zurrivan Pumama, S.E., M.Si. is inadmissible. This ruling refers to H.L.A. Hart's principle of justice which emphasizes the importance of accuracy in drafting charges and meeting legal requirements, although for victims, this verdict may be felt to have undermined their sense of justice.

**Keywords: domestic violence, charges, verdicts.**

ii

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas berkat, petunjuk, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan tesis ini dengan judul: *“Putusan Tuntutan Penunutut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor864/pid.sus/2023/pn-mdn)”* Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Dharmawangsa Medan, Sumatera Utara.

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tulisan ini. Tanpa kehadiran mereka, penulisan tesis ini mungkin tidak akan terwujud dengan lancar. Penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kusbianto, S.H, M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan dan sekaligus Dosen Pembimbing I
2. Bapak Dr. Ariman Sitompul, S.H, M.H selaku Kepala Program Studi Magister Hukum dan sekaligus Dosen Pembimbing II.
3. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah dengan tulus berbagi ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi sumber pencerahan dan petunjuk bagi perjalanan penulis ke depan.
4. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Alm. Sulaiman Siahaan dan Almh Rensi Sitorus yang telah bersusah payah untuk mengasuh dan mendidik.

ii

iii

1. Istri tercinta Evie Jumiaty, S.E. dan anak tercinta Ahmad Fadly Siahaan dan seluruh keluarga besar saya dan istri saya.
2. Kepada teman-teman di Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
3. Akhirnya, dengan penuh ketundukan kepada Allah SWT, semoga kita semua diberikan petunjuk dan hidayah-Nya untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat.

Medan, 26 April 2024

Penulis,

**Abdul Satar**

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR. iii

DAFTAR ISI. iv

**BAB I : PENDAHULUAN**. 1

* 1. Latar Belakang. 1
  2. Perumusan Masalah 9
  3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. 10
  4. Keaslian Penulisan 11
  5. Kerangka Teori dan Konsep 14

1. Kerangka Teori 14
2. Kerangka Konsep 27
   1. Metode Penelitian 28
3. Jenis dan Sifat Penelitian 28
4. Jenis Penelitian 28
5. Sifat Penelitian 28

iii

iv

1. Alat Pengumpulan Data 29
2. Analisa Data 30
   1. Sistimatika Penulisan 31

**BAB II : UNSUR DAN SYARAT PEMIDANAAN UNTUK MEMUTUS**

**PERAKRA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** 33

1. Pengertian Hukum dan Hukum Pidana 33
2. Surat Dakwaan dan Tuntutan 45
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 56
4. Unsur dan Syarat Kekerasan Dalam Rumah Tangga 64

**BAB III : DASAR HUKUM TUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH**

**TANGGA (KDRT).**  74

1. Jenis Putusan Perkara Tindak Pidana KDRT 74
2. Kretaria Jaksa Penuntut Umum Perkara KDRT 76
3. Teknis Penanganan Perkara KDRT 77
4. Dasar Hukum Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara KDRT 85

**BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM TUNTUTAN PENUNTUT UMUM**

**TODAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PUTUSAN**

**NOMOR 864/PID.SUS/2023/PN-MDN** 94

* 1. Kasus Posisi 94
  2. Pertimbangan dan Putusan Hakim 97
  3. Analisa Akibat Hukum Dakwaan Batal Demi Hukum Sehingga

Tuntutan Tidak Dapat Diterima 107

**BAB V : PENUTUP** 112

A. Kesimpulan 112

B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 116

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Perubahan Ketiga pada tanggal 9 November 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan*,* “Negara Indonesia adalah negara hukum”[[1]](#footnote-1)

Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.[[2]](#footnote-2)

Negara yang berlandaskan hukum selalu mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakatnya melalui undang-undang yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan memperkuat kondisi yang damai bagi penduduknya. Melalui penerapan hukum yang adil dan bijaksana, negara berupaya untuk meminimalkan konflik sosial, mencegah kejahatan, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu dihormati dan dipenuhi. Dengan demikian, negara dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang beradab dan makmur

1

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum *(equality before the law)****.*** *[[3]](#footnote-3)*

*Rule of Law* adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum*. Rule of Law* juga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik dalam hubungan antar warga negara maupun dalam hubungan dengan pemerintah.[[4]](#footnote-4)

Hukum dalam suatu negara berfungsi sebagai penentu batas wewenang individu dalam kehidupan sosial. Hukum juga menjamin hak-hak warga, termasuk hak keamanan dari ancaman kejahatan yang dapat membahayakan seseorang. Hukum juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat, memastikan bahwa setiap orang diperlakuan adil dan merata tanpa memandang status social, ekonomi atau latar belakang mereka. Dengan demikian.

hukum menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera, di mana setiap orang hidup dengan tenang dan dengan rasa aman . Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.[[5]](#footnote-5)

Tujuan dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Sebagai negara hukum idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.[[6]](#footnote-6)

Secara umum fungsi hukum dapat disimpulkan yaitu :

a. Hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum digunakan sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat diwujudkan.

b. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin. Hukum memiliki sifat mengikat, memaksa dan dapat dipaksakan oleh alat negara yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga membuat orang tunduk agar tidak melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya serta upaya pemulihan yang dapat diterapkan kepada siapapun. Dengan demikian keadilan akan tercapai.

c. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan otoritas untuk mengarahkan masyarakat kearah yang maju.[[7]](#footnote-7)

Negara hukum dan kepastian hukum saling berhubungan dalam sistem hukum. Negara hukum memastikan bahwa semua individu dan institusi, termasuk negara, tunduk pada hukum yang berlaku. Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi

Tanpa kepastian hukum, prinsip-prinsip negara hukum tidak dapat diterapkan secara efektif. Jika hukum tidak jelas atau tidak konsisten, maka setiap orang dan institusi mungkin tidak tahu bagaimana harus bertindak atau apa konsekuensinya jika mereka melanggar hukum. Ini bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat, maka kepentingan yang dirugikan harus diganti, harus diperbaiki, peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik.[[8]](#footnote-8)

Dalam masyarakat, salah satu permasalahan yang sering muncul berupa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Joko Sriwidodo, kekerasan perempuan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman yang dialami oleh perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, perampasan kebebasan, dan memperkuat subordinasi perempuan..[[9]](#footnote-9)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam konteks KDRT, kepastian hukum memastikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hukum yang jelas dan konsisten melindungi korban dan memastikan perlakuan adil terhadap pelaku. Kepastian hukum juga penting untuk menjamin penanganan kasus KDRT secara konsisten, tanpa memandang status sosial, gender, atau faktor lainnya dari korban atau pelaku.

Penegakan hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dengan mencegah dan menindak pelanggaran. Tantangan penegak hukum adalah meningkatkan moral dan kredibilitas untuk mewujudkan keadilan Dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim. Kejaksaan memiliki peran kunci karena jaksa penuntut umum berada di tengah-tengah penyidik dan hakim dalam penyelesaian perkara. Penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan, dan penetapan pengadilan.

Dalam proses hukum perkara tindak pidana perkara KDRT peran jaksa penuntut umum sangat signifikan. Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan, “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.[[10]](#footnote-10)

Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Dengan demikian keputusan untuk menuntut atau tidak, berada di tangan Jaksa (vide Pasal 139 KUHAP).

Meskipun penuntut umum memiliki wewenang menuntut, mereka harus bertindak sesuai dengan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Pasal 15 KUHAP. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa tindakan penuntut umum di pengadilan mempengaruhi putusan hakim. Dalil-dalil yang diajukan juga harus dapat dibuktikan sehingga hakim dapat mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan.

Surat dakwaan merupakan dasar Jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang terdakwa yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan prapenuntutan, yaitu memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk memastikan kelengkapan formal dan material. Berdasarkan hasil penyidikan, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan.

Surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Jika tidak sesuai, surat dakwaan dianggap tidak benar dan tidak dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa dapat mengajukan keberatan atau eksepsi jika menemukan perbedaan antara rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan.

Menurut M.Yahya Harahap, pengadilan harus teliti apakah surat dakwaan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Hakim dapat memeriksa kesesuaian rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.[[11]](#footnote-11)

Pasal 143 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa penuntut umum harus melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut, disertai dengan surat dakwaan. Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP mengatur syarat formil dari surat dakwaan, termasuk pencantuman nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Sedangkan, Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP mengatur tentang syarat materil, yang mencakup uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, beserta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Uraian secara cermat yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP mengartikan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan harus teliti dan cermat. Sedangkan uraian secara jelas, berarti kejadian atau fakta kejadian harus diuraikan secara jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Surat Dakwaan yang lengkap harus mencakup semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis dengan jelas dalam uraian fakta kejadian yang dijelaskan dalam Surat Dakwaan. Dakwaan yang tidak dilakukan secara cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dapat berakibat dakwaan batal demi hukum dan penuntutan yang dilakukan penuntut umum tidak dapat diterima.

Dalam memutuskan apakah tuntutan penuntut umum dapat diterima atau tidak, hakim harus memastikan bahwa dalam proses peradilan keadilan terwujud. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam perkara, bukti-bukti yang disajikan, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hakim harus objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak, termasuk penuntut umum..

Selain itu, pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam proses pengadilan karena pembuktian akan menentukan nasib terdakwa. Jika bukti yang disajikan tidak cukup atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan, terdakwa dapat dibebaskan. Hanya bukti yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dianggap sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti-bukti diluar ketentuan tersebut tidak dapat diterima dalam proses hukum.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan terdakwa Zurrivan Purnama dalam putusan No. 864/PID/.SUS/2023/PN-MDN. Peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini di mana penuntut umum tidak teliti dalam mempertimbangkan faktor-faktor krusial dalam surat dakwaannya.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil dianggap tidak sah secara hukum, sehingga konsekuensinya adalah tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Dalam proses pengadilan, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh surat dakwaan meliputi elemen-elemen seperti identifikasi terdakwa, perbuatan yang didakwakan, dan alasan hukum yang mendukung dakwaan tersebut. Jika surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan ini, maka tuntutan penuntut umum tidak akan diterima oleh majelis hakim.

Penulis dalam penelitian ini ingin menganalisis lebih lanjut mengenai tuntutan penuntut umum yang tidak dapat diterima dikarenakansurat dakwaan batal demi hukum sehingga tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam sebuah tesis yang berjudul, “Analisis Putusan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara KDRT (Studi Putusan No. 864/PID/.SUS/2023/PN-MDN).

Penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi juga memperhatikan tuntutan penuntut umum yang tidak dapat diterima dalam perkara KDRT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa baik korban maupun terdakwa dalam kasus KDRT mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan yang tepat dari sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dalam penanganan perkara KDRT

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas,adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana unsur dan syarat pemidanaan untuk memutus perkara KDRT.
2. Bagaimana dasar hukum tuntutan penunutut umum tidak dapat diterima dalam perkara KDRT.
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam putusan No 864/PID/.SUS/2023/PN-MDN.

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana unsur dan syarat pemidanaan untuk memutus perkara KDRT.
  2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana dasar hukum tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam perkara KDRT.
  3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam putusan No. 864/PID/.SUS/2023/PN-MDN.

1. **Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

* 1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menolak tuntutan penuntut umum dalam perkara KDRT. Dengan memahami alasan di balik keputusan tersebut, penuntut umum dapat meningkatkan strategi penuntutan mereka dan mengatasi kelemahan yang mungkin ada dalam kasus serupa di masa depan.

1. **Keaslian Penulisan**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan., belum ada penelitian yang menyangkut masalah **“Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara KDRT (Studi Putusan No. 864/PID/.SUS/2023/PN-MDN)”** untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum pada Universitas Dharmawangsa Medan.

Tesis ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Tesis ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan atau perguruan tinggi lainnya.

Judul-judul tesis yang berkaitan dengan topik tentang putusan dakwaan batal demi hukum dan tuntutan tidak tidak dapat diterima yang pernah ditulis sebelumnya, antara lain :

* + - 1. Dhinda Ratri Putristira, NIM: 2122011084, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2023, dengan judul “Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Dinyatakan Tidak Dapat Diterima) Terhadap Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor : 376.PID.B/2021/PN KOT)”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah kajian hukum pidana terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O*) pada putusan akhir tingkat pertama perkara tindak pidana penyerobotan tanah?
2. Apakah putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) pada perkara tindak pidana penyerobotan tanah sudah memenuhi nilai keadilan?

Perbedaan antara penelitian yang disebutkan sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian: Penelitian yang disebutkan sebelumnya dilakukan di Lampung, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dilakukan di kota Medan. Perbedaan lokasi penelitian ini dapat mempengaruhi konteks geografis, sosial, dan budaya yang berbeda dalam masing-masing wilayah, sehingga hasil penelitian dapat memiliki perbedaan dalam hal implementasi dan interpretasi temuan.
2. Subyek Penelitian: Penelitian yang disebutkan sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan subyek penelitian ini mengindikasikan perbedaan dalam fokus dan tujuan penelitian, serta melibatkan aspek-aspek hukum yang berbeda.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian tersebut merupakan penelitian yang berbeda dalam hal lokasi dan subyek penelitian. Hal ini menunjukkan keragaman dalam topik penelitian dan konteks hukum yang diteliti oleh masing-masing peneliti.

* + - 1. Muhammad Rama Refan, NIM: l4220111108, Mahasiswa Program Pascasarjana Program Magister Hukum, Fakulttas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2016, dengan judul Analisis Putusan Sela yang membatlkan Dakwaan Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk).

Rumusan Masalah :

* + - * 1. Apakah dasar pertimbangan putusan sela oleh hakim yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk
        2. Bagaimanakah relevansi dikabulkannya eksepsi penasihat hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tjk dihubungkan dengan peradilan cepat dan biaya ringan?

Perbedaan antara penelitian yang disebutkan sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian: Penelitian yang disebutkan sebelumnya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dilakukan di kota Medan. Perbedaan lokasi penelitian ini dapat mempengaruhi konteks hukum dan peraturan yang berlaku dalam masing-masing wilayah, sehingga hasil penelitian dapat memiliki perbedaan dalam hal implementasi dan interpretasi hukum.
2. Waktu Penelitian: Penelitian yang disebutkan sebelumnya dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak disebutkan tahunnya. Perbedaan waktu penelitian ini dapat mempengaruhi kondisi sosial, politik, dan hukum yang berlaku pada saat penelitian dilakukan. Hal ini dapat berdampak pada data dan temuan yang diperoleh dalam penelitian.
3. Subyek Penelitian: Penelitian yang disebutkan sebelumnya berkaitan dengan perkara tindak pidana pencurian, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan subyek penelitian ini mengindikasikan perbedaan dalam fokus dan tujuan penelitian, serta mungkin melibatkan aspek-aspek hukum yang berbeda..

1. **Kerangka Teori dan Konsep**
2. **Kerangka Teori**

Teori berasal dari kata teheoria dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya bersal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya.[[12]](#footnote-12)

Kerangka teori dalam penelitian adalah struktur yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif kerangka teori disusun berdasarkan latar belakang permasalahan dengan dengan ditunjang oleh teori-teori atau hasil penelitian terlebih dahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan objek permasalahan penelitian.[[13]](#footnote-13)

Teori hukum mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan sistimatika hukum. Pengertian-pengertian pokok itu seperti misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, objek hukum, peristiwa hukum dan lain-lain, memiliki pengertian yang bersifat umum dan bersifat teknis.[[14]](#footnote-14)

Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini, digunakan beberapa teori, yaitu grand theory, middle range theory, dan applied theory yang digunakan untuk membedah atau menaganalisis permasalahan dalam penelitian ini:

1. Teori Kepastian Hukum *(Grand Theory)*
2. Teori Pembuktian *(Middle Range Theory)*
3. Teori Keadilan *(Applied Theory)*.
   * + 1. **Teori Kepastian Hukum *(Grand Theory)***

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan- hukum perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.[[15]](#footnote-15) Dalam konteks kepastian hukum, penting bagi hukum untuk dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh ambigu atau samar, sehingga setiap individu dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hukum yang jelas memberikan panduan yang pasti bagi individu dan masyarakat dalam mengikuti aturan yang berlaku

Terdapat tiga elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam penerapan hukum, yaitu: kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan. Untuk mencapai hasil yang optimal, ketiga elemen ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Akan tetapi, dalam kenyataannya, untuk mencapai titik temu yang seimbang antara ketiga elemen tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan kegelisahan karena orang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Namun, jika terlalu menekankan pada kepastian hukum dan ketat dalam mematuhi peraturan, dapat menghasilkan sistem yang kaku dan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan. Adanya kepastian hukum menjadi harapan bagi mereka yang mencari keadilan, terutama dalam menghadapi sikap sewenang-wenang dan arogansi yang terkadang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kepastian hukum memberikan masyarakat pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum. Tanpa kepastian hukum, orang akan kebingungan dalam menentukan tindakan yang benar atau salah, yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat norma yang baik serta jelas dalam sesuatu undang- undang dan akan jelas pulah penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumanya

Menurut Lon Fuller ada “delapan prinsip legalitas” yang harus diikuti dalam

membuat hukum, yaitu:

* + 1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu
    2. Peraturan itu harus diumumkan secara layak
    3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut
    4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat
    5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin
    6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
    7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah
    8. Harus dapat kesesuaian antar tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.[[16]](#footnote-16)

Pendapat Lon Fuller mengenai kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian antara peraturan hukum dan implementasinya, sehingga melibatkan aspek tindakan, perilaku, tetapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan hukum positif. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai unsur dan syarat pemidanaan dalam perkara KDRT, peneliti menggunakan teori kepastian hukum Lon Fuller sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana kepastian hukum dapat mempengaruhi proses pemidanaan dalam kasus KDRT dan apakah unsur dan syarat pemidanaan telah terpenuhi dengan adil dan tepat.

**2. Teori Pembuktian Pidana *( Middle Range Theory)***

Dalam tesis ini, penulis menggunakan Teori Pembuktian sebagai *Middle Range Theory* untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Dengan menerapkan teori hukum pembuktian, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan pembuktian dalam konteks penelitian ini dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan kontribusi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Melalui penerapan teori hukum pembuktian, penulis dapat mengungkap hubungan antara pembuktian dan isu-isu yang diteliti, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap hasil penelitian

Pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana dalam proses pemeriksaan kasus pidana di pengadilan. Pembuktian dianggap sangat penting dalam hukum acara pidana karena tujuan dari pemeriksaan kasus pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, yang menjadi inti dari hukum acara pidana itu sendiri. Pembuktian memiliki makna bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelaku yang bersalah, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nasib terdakwa akan ditentukan melalui proses pembuktian.

Menurut Djoko Sumaryanto, tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.[[17]](#footnote-17)

Dalam proses pembuktian secara yuridis, terdapat pemisahan antara pihak yang mengajukan bukti dan pihak yang menilai bukti tersebut, yaitu:

1. Yang mengajukan alat bukti adalah:
2. dalam perkara perdata: para pihak;
3. dalam perkara pidana: Jaksa.
4. Yang menilai pembuktiannya itu adalah hakim.[[18]](#footnote-18)

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal ada 3 (tiga) sistem pembuktian, yakni:

1. **Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif** ***(Positive Wettelijk Bewijstheorie)*.**

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time.* Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (formele bewijstheorie), yang merupakan pendekatan formal dan sistematis dalam mengembangkan bukti matematis untuk menegaskan kebenaran suatu pernyataan matematika.

1. **Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka *(conviction in time)***

Sistem pembuktian *conviction in time* ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

1. **Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis *(conviction raisonnee/convictim-raisonnee)***

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktorkeyakinan hakim ”dibatasi”.Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem convictim-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinanya *(vrije bewijs theorie).*

1. **Sistem Pembuktian Undang-undang Secara Negatif *(Negatief Wettelijk stelsel)***

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara *positif (positief wettelijke bewijs theorie)* dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim *(conviction intim/conviction raisonce)*. Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(negatief wettelijke bewijs theorie*) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limintatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiil maupun secara prosedural.[[19]](#footnote-19)

Di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem negatif berdasarkan undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya”.[[20]](#footnote-20)

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif *(negatief wettlijke bewijs theorie)* sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.[[21]](#footnote-21)

Untuk menjawab rumusan masalah tentang dasar hukum tuntutan penuntut umum yang tidak dapat diterima dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis menggunakan teori pemidanaan undang-undang Secara Negatif *(Negatief Wettelijk stelsel)* sebagai kerangka teoritis. Dengan menerapkan teori ini, penulis dapat menganalisis bagaimana sistem hukum yang berlaku mengatur penggunaan bukti dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, penulis juga dapat memahami bagaimana teori pemidanaan undang-undang secara negatif mempengaruhi tuntutan penuntut umum dan mengapa dalam beberapa kasus, tuntutan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan. Dengan memperdalam pemahaman tentang teori ini, penulis dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan.

1. **Teori Keadilan**

Teori Keadilan *(Justice Theory)* sebagai *Middle Range Theory.*  *Middle Range Theory* adalah jenis teori yang berada di antara teori-teori yang sangat umum *(grand theory)* dan teori-teori yang sangat spesifik *(applied theory).* *Middle Range Theory* berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara teori-teori yang sangat abstrak dan teori-teori yang sangat khusus dengan mengembangkan konsep-konsep yang lebih spesifik dan terukur.

Secara umum, keadilan adalah prinsip atau konsep yang menunjukkan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu. Keadilan melibatkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, kesempatan yang adil, dan perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; tidak sewenang-wenang.[[22]](#footnote-22)

Plato (427-347 SM), menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkan pada kehidupan negara, mengemukan pada jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran *(logistikan)* perasaan dan nafsu, baik psikis maupun jasmani *(epithumatikon),* dan rasa baik dan jahat *(thumoeindes).* Jiwa itu teratur secara baik apabila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu.[[23]](#footnote-23)

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu :

1. Keadilan dalam arti luas.
2. Keadilan dalam arti khusus [[24]](#footnote-24)

Keadilan dalam arti luas merujuk pada prinsip-prinsip umum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat. Ini melibatkan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keadilan distributif, dan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa memandang perbedaan status atau kekayaan.

Sedangkan keadilan dalam arti khusus keadilan berlaku hanya pada orang tertentu saja (khusus). Dalam arti khusus menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua konsep utama

1. Keadilan distributive
2. Keadilan korektif. [[25]](#footnote-25)

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan keuntungan secara adil di dalam masyarakat, di mana setiap individu menerima bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Sementara itu, keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan timbal balik antara individu-individu dalam transaksi atau interaksi sosial, di mana setiap individu diperlakukan secara adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan membagi keadilan menjadi dua macam ini, Aristoteles memberikan kerangka pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep keadilan dalam kehidupan sosial dan politik

Dalam pemikiran John Rawls, terdapat dua prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam teorinya, yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan, prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap skema dasar dari hak-hak dan kebebasan yang sama untuk semua. .
2. Prinsip Perbedaan, prinsip ini berkaitan dengan distribusi sumber daya sosial dan ekonomi. Ketimpangan social dan ekonomi meski diatur sedemikian mengatur sedemikian rupa sehingga:
   1. dapat memberi keuntungan semua orang;
   2. semua posisi dan jabatan sama terbuka bagi semua orang. [[26]](#footnote-26)

Prinsip pertama berkenaan dengan kebebasan dasar warga negara, termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak untuk memilih, dan hak untuk memiliki properti pribadi. John Rawls, seorang filsuf politik terkenal, percaya bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang mereka, seharusnya memiliki akses yang sama terhadap hak-hak ini. Prinsip kebebasan dasar ini mencerminkan konsep kesetaraan politik dan perlindungan hak individu dalam masyarakat. Menurut Rawls, setiap warga negara harus memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, terlibat dalam proses demokratis, dan memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan properti pribadi mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan yang sama kepada semua individu tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, namun harus demi keuntungan semua orang. Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat dibenarkan hanya jika mereka menguntungkan individu yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesenjangan antara kaya dan miskin dapat diterima asalkan mereka yang paling miskin mendapatkan manfaat dari kesenjangan tersebut.

Selanjutnya H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan, yang mengemukakan sebagai berikut :

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesataraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan social ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian (proportion) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.[[27]](#footnote-27)

Dalam konteks keadilan, H.L.A. Hart menekankan pentingnya adanya prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum. Menurut Hart, prinsip keadilan terkait dengan bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat. Individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengannya.

Dalam konteks pemidanaan KDRT, peneliti menggunakan teori keadilan H.L.A. Hart untuk menjawab rumusan masalah mengenai unsur dan syarat pemidanaan dalam kasus KDRT. Teori keadilan Hart menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kepentingan korban yang membutuhkan perlindungan. Dengan demikian, teori keadilan H.L.A. Hart memberikan landasan yang penting dalam memahami dan menjawab rumusan masalah terkait pemidanaan dalam kasus KDRT, dengan menekankan pentingnya menjaga keadilan, perlindungan korban, dan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku.

**2. Kerangka Konsep**

Menurut Abdul Bari Azed, kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan ditelitii dan/atau diuraiakan dalam karya ilmiah.[[28]](#footnote-28)

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

1. **Analisa atau analisis,** adalah suatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik itu sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya.
2. **Putusan,** adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
3. **Tuntutan penuntut umum** adalah tuntutan diajukan penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai.
4. **Putusan tuntutan penuntut umum** tidak dapat diterima adalah putusan pengdilan yang berpendapat tuntutan yang diajukan terhadap terdakwa tidak dapat diterima oleh hakim.
5. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT**) adalah tindak kekerasan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga terhadap anggota rumah tangga lainnya.
6. **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian[[29]](#footnote-29)

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melakukan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[[30]](#footnote-30)

1. Sifat Penelitian

Untuk memastikan hasil penelitian yang bermanfaat dan mendalam, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail tentang fenomena atau masalah yang sedang diteliti, serta menganalisis hubungan dan pola yang terdapat dalam data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian deskriptif analitis, peneliti mengumpulkan data secara sistematis dan mendetail, kemudian menganalisis data tersebut secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik data yang ada. Selanjutnya, peneliti juga melakukan analisis analitis untuk mengidentifikasi hubungan, pola, atau tren yang terdapat di antara data yang telah dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan informasi yang berharga terkait permasalahan yang sedang diteliti..

1. **Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, digunakan teknik studi kepustakaan dengan melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini mencakup penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah terkait permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan buku yang membahas topik yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa referensi hukum, komentar hukum, dan panduan praktis yang memberikan panduan dan interpretasi rinci tentang hukum yang berlaku. Dengan menggunakan studi kepustakaan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman mendalam dan kontribusi berharga dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum

1. **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan informasi yang relevan. Tujuan dari analisa data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang ada, serta mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan hasil analisis tersebut

1. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya untuk tujuan lain sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti literatur, dokumen hukum, kebijakan publik, dan penelitian sebelumnya. Penelitian normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum, aturan, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem hukum

1. **Data Tersier**

Data tersier merujuk pada data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga yang tidak terlibat langsung dalam penelitian tersebut. Data tersier dapat berupa data statistik yang mencakup angka, persentase, atau grafik yang menggambarkan fenomena atau keadaan tertentu. Selain itu, data tersier juga dapat berupa data survei yang diperoleh melalui pengumpulan jawaban dari responden yang mewakili populasi yang diteliti. Data tersier juga dapat berupa data yang telah diproses dan dianalisis oleh pihak lain, seperti hasil penelitian sebelumnya, laporan riset, atau artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Dengan menggunakan data tersier ini, penelitian dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang sedang diteliti, serta dapat membandingkan dan mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya.

1. **Sistimatika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab, dengan maksud untuk mempermudah dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan, supaya pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tema dan pokok pembahasan. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

**BAB I** : Berisikan pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jenis dan Sifat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Tabel Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Berisikan jawaban masalah atas permasalahan yang pertama terdiri dari syarat dan unsur pemidanaan, yang berisikan gambaran umum mengenai Pengertian Hukum dan Hukum Pidana, Surat dakwaan dan Tuntutan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Syarat dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga.

**BAB III** : Berisikan jawaban masalah atas permasalahan yang kedua terdiri dari Dasar Hukum Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara KDRT, yang berisikan Jenis Putusan Perkara Tindak Pidana KDRT, Kreteria Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara KDRT, Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara KDRT, Dasar Hukum putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam perkara KDRT berdasarkan Putusan Nomor 864/pid.sus /2023/pn-mdn.

**BAB IV** : Berisikan jawaban masalah atas permasalahan yang ketiga terdiri dari Pertimbangan Hakim Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Nomor 864/pid.sus /2023/pn-mdn, yang berisikan Kasus Posisi, Pertimbangan dan Putusan Hakim dan Analisa Akibat Hukum Dakwaan Batal demi hukum Sehingga Tuntutan Tidak Dapat Diterima

**BAB V** : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

**BAB II**

**UNSUR DAN SYARAT PEMIDANAAN UNTUK**

**MEMUTUS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

1. **Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana**
2. **Pengertian Hukum Pidana**

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang sering didefinisikan dalam istilah “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada individu atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) yang melanggar hukum pidana.[[31]](#footnote-31)

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.[[32]](#footnote-32)

33

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik, sama seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Sebagai hukum publik, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sehingga posisi negara dan alat penegak hukumnya menjadi sangat penting.[[33]](#footnote-33)

Menurut Simons, hukum pidana sebagai hukum publik karena :

1. Hukum pidana itu mengatur hubungan hukum antara individu dengan masyarakat sebagai masyarakat;
2. Hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukan;
3. Sifat hukum pidana itu ternyata khusus dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu tetap menjadi peristiwa pidana biarpun peristiwa itu dilakukan dengan persetujuan dari yang dikenakan akibat tindakan tersebut;
4. Dan ternyata dalam hal penuntut umumnya dituntut tidaknya suatu peristiwa pidana tidak tergantung pada kehendak dari yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu
5. Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam tangan suatu alat negara yaitu dalam tangan Kejaksaan”

Van Hamel merumuskan, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.[[34]](#footnote-34) Hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengaturhidup kemassyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.[[35]](#footnote-35)

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[[36]](#footnote-36)

Hukum pidana berfokus pada kepentingan publik. Jika terjadi pelanggaran norma hukum, perlu ada tindakan untuk menegakkan hukum, yaitu dengan menghukum pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, upaya penegakan hukum yang telah atau sedang berlangsung terkadang menimbulkan masalah yang tidak terpecahkan, seiring dengan realitas pelanggaran hukum dalam bentuk kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Hukum pidana terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu[[37]](#footnote-37) :

1. **Hukum pidana materil**, yaitu ketentuan hukum yang memuat :
   1. rumusan tentang tindak pidana;
   2. pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
   3. rumusan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum pidana materil meliputi :

1. Hukum pidana umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Ketentuan hukum pidana umum ini dapat dipejari dalam ketentuan KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu :

Buku I : memuat ketentuan umum Pasal 1 sampai Pasal 103 KUHP

Buku II : memuat ketentuan kejahatan Pasal 104 sampai Pasal 448 KUHP

Buku III : memuat ketentuan pelanggaran

1. Hukum pidana khusus, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya TNI dan polri. Dan juga mengatur ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang perbuatan tertentu, seperti pidana psikotropika, narkotika, perbankan, tindak pidana pemilu dan lain-lain.
2. **Hukum pidana formil**, yaitu ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana materil melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana formil dirumuskan dalam KUHAP
3. **Ruang lingkup berlakunya hukum pidana**
4. **Berlakunya menurut waktu**
   1. **Asas Legalitas**

Peraturan hukum, termasuk peraturan hukum pidana, pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang. Ini berarti hukum pidana berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan. Kriminalisasi adalah proses di mana suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana. Proses ini berakhir dengan pembentukan undang-undang, yang berarti bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana setelah diatur dalam undang-undang. Selain kriminalisasi, ada juga dekriminalisasi, yang merupakan proses penghapusan sifat pidana dari suatu perbuatan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang, keputusan pengadilan, atau perubahan kebijakan hukum yang mengubah status pidana suatu perbuatan menjadi non-pidana. Dekriminalisasi dapat terjadi ketika terdapat perubahan dalam pandangan masyarakat atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana.

Asas legalitas adalah prinsip yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang pidana yang ada sebelumnya. Prinsip ini tidak dapat diterapkan secara surut, yang berarti seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan sebelum adanya aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Prinsip legalitas ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Dengan adanya prinsip legalitas, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah melanggar ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan..

Asas Legalitas dalam hukum pidana itu sangat penting, asas ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi apa tidak. Maka apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan juga apakah aturan tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana itu

Dalam catatan sejarah Anselm von Fouerbach merumuskan azas ini dalam bahasa latin, *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana

menurut undang-undang), *Nulla poena sine crimine (*tidak ada pidana tanpa tindak pidana), *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang).[[38]](#footnote-38)

Secara yuridis azaslegalitas ini dapat dipahami dari Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi: *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.*

Dari asas legalitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut dapat disebutkan adanya 4 (empat) larangan (prohibitions), yaitu[[39]](#footnote-39)

1. *“Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta”,* yaitu larangan untuk memidana atas dasar hukum tidak tertulis *(unwritten law);*
2. *“Nullum crimen, nulla poena sine lege strica”,* yaitu larangan untuk melakukan analogi*;*
3. *“Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia”,* yaitu larangan untuk memberlakukan hukum pidana secara surut *(retroaktif);*
4. *“Nullum crimen, nulla poena sine lege certa”,* yaitu larangan terhadap perumusan huku pidana yang tidak jelas *(unclearterms).*

Dalam asas legalitas, Pasal 1 ayat (1) KUHP, digunakan kata-kata “perundang-undangan” pidana, bukan undang-undang pidana. Hal ini berarti bahwa bukan undang-undang dalam arti formil saja, tetapai juga meliputi ketentuanketentuan perundang-undangan di bawah undangundang, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang memuat rumusan tindak pidana.[[40]](#footnote-40)

* 1. **Asas Retroaktif**

Dalam pasal 1 ayat (2) KUHP disebutkan: *”bila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”*

Menurut Barda Nawawi Arief Ketentuan tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) bukan merupakan dasar hukum untuk berlakunya peraturan hukum pidana secara surut (retroaktif), melainkan hanya memberikan pedoman kepada penegak (aparat pelaksana) hukum mengenai ketentuan hukum pidana mana yang berlaku dalam masa transisi, yakni dalam terjadi perubahan perundang-undangan pidana. Dalam masa transisi, di mana akan ada (berlaku) dua peraturan hukum pidana, peraturan hukum pidana yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan terdakwa.

Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut juga dapat dikatakan sebagai ketentuan umum tentang “Aturan Peralihan”. Namun, dalam realita, pemberlakuan ketentuan ini ternyata tidak banyak dipahami oleh para penegak hukum. Realitas ini terjadi ketika ada penggantian UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU yang baru, yakni UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku (dicabut). Berhubung dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak diadakan “aturan peralihan, maka para penegak hukum menjadi bingung. Mereka bertanya, bagaimana dengan kasus korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999?

Dengan demikian, menurut Pasal 1 ayat (2), peraturan hukum pidana dimungkinkan berlaku surut. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila:

1. Ada perubahan UU pidana sesudah terdakwa melakukan tindak pidana;
2. Peraturan (UU) pidana yang baru lebih meringankan terdakwa.[[41]](#footnote-41)
3. **Berlakunya menurut Tempat *(locus)***
   * 1. **Azas Teritorial**

Azas teritorialitas atau wilayah menegaskan bahwa hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa seseorang yang melanggar hukum di Indonesia akan tunduk pada hukum Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan atau asal negara mereka. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negara serta memberikan keadilan bagi semua individu yang berada di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip teritorialitas, hukum dapat diterapkan secara adil dan setiap pelaku tindak pidana dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Asas teritorialitas dalam hukum pidana memiliki makna bahwa setiap pelaku tindak pidana, baik warga negara sendiri maupun asing, dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Prinsip ini didasarkan pada pengakuan kedaulatan setiap negara dan kewajiban setiap negara untuk menjaga ketertiban di wilayahnya. Dengan demikian, negara memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua individu yang melakukan pelanggaran di wilayahnya, tanpa memandang kewarganegaraan mereka.

Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi siapa pun yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, prinsip teritorialitas ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua individu yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara ini. Prinsip ini menegaskan bahwa siapa pun yang melanggar hukum di wilayah Indonesia akan tunduk pada hukum Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan atau asal negara mereka. Dengan azas teritorialitas ini, negara dapat menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayahnya. Prinsip ini memungkinkan negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi keamanan, seperti penegakan hukum, pengawasan perbatasan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan.

Dengan adanya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia, setiap individu yang melakukan tindak pidana dapat diadili dan diberikan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam Pasal 2 KUHP tersebut, ditegaskan bahwa aturan pidana berlaku bagi "setiap orang", yang mencakup baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Asas teritorial ini juga diperluas dengan ketentuan yang menyatakan bahwa peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap individu yang melakukan tindak pidana di luar negeri menggunakan perahu atau pesawat udara Indonesia, sesuai dengan Pasal 3 KUHP.

* + 1. **Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas**

Pasal 5 ayat (1) KUHP, menyatakan: *“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan:*

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Pasal 5 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara setelah melakukan perbuatan. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang menjadi warga negara setelah melakukan tindak pidana di Indonesia, mereka tetap dapat diadili dan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri dapat dikenakan aturan pidana Indonesia. Hanya tindak pidana tertentu yang dapat tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia, dan bahkan dalam beberapa kasus terdapat pembatasan-pembatasan yang berlaku. Hal ini tergantung pada peraturan hukum yang berlaku dan perjanjian internasional yang telah ditetapkan. Tindak pidana tersebut adalah:

1. semua tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan terhadap martabat Presiden (tercantum dalam bab I dan II Buku II), serta penghasutan (Pasal 160), penyebaran suratsurat yang mengandung penghasutan (Pasal 161), membuat tidak cakap dalam dinas militer (Pasal 240), bigami (Pasal 279), perampokan di kapal (Pasal 450-451). Terhadap semua kejahatan ini tidak diperlukan syarat apapun, artinya apabila ada warga negar Indonesia melakuan kejahatan tersebut di luar Indonesia, maka ia langsung dapat dikenakan aturan pidana Indonesia.
2. Semua tindak pidana, dengan syarat:
3. menurut aturan pidana Indonesia dipandang sebagai kejahatan; dan
4. menurut aturan pidana negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan sanksi pidana.

Asas nasionalitas aktif memungkinkan penerapan hukum pidana berdasarkan kewarganegaraan atau nasionalitas individu yang melakukan suatu tindakan. Ini berarti bahwa negara dapat menjalankan yurisdiksinya dan memberlakukan hukum pidana terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di dalam maupun di luar wilayah negara tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan dan keamanan warganya, serta menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Dengan demikian, asas nasionalitas aktif memainkan peran penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hukum bagi warga negara.

Asas nasionalitas aktif menegaskan bahwa hukum pidana dapat diberlakukan pada warga negara, tanpa memandang di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Ini berarti bahwa warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. Prinsip ini dicantumkan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, asas nasionalitas aktif memastikan bahwa warga negara Indonesia tetap bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, tidak peduli di mana tindak pidana tersebut dilakukan.

1. **Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan**

Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan mengandung prinsip bahwa aturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia maupun non-warga negara yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum negara Indonesia. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 4 sub 1, 2, dan 3, Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menangani tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum negara, tanpa memandang status kewarganegaraan pelaku. Dengan demikian, prinsip ini memastikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi semua individu yang melakukan tindak pidana yang merugikan negara Indonesia.

Asas Nasionalitas Pasif ini menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang tindak pidana di luar Indonesia :

* Pasal 104 (makar), 106 (makar u/ asing), 107 (makar gulingkan pemerintahan), 108 (pemberontakan), 131 (penyerangan terhadap presiden/ wakil presiden);
* Kejahatan mengenai mata uang, materai Indonesia;
* Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Pemda dan/atau Pemerintah Indonesia.
* Asas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh warganegara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar.

Dasar hukum dalam pemberlakuan asas ini adalah bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menjalankan yurisdiksinya dan memberlakukan hukum pidana terhadap individu yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum negara tersebut. Dengan demikian, prinsip ini merupakan landasan yang kuat dalam menjamin penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kepentingan hukum Negara

1. **Asas Universal**

Asas Universal menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk pelaku tindak pidana yang mengganggu dan merugikan kepentingan dunia. Namun, penerapan Pasal 2-5, 7, dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia berlaku secara umum, ada pengecualian yang diakui dalam hukum internasional yang membatasi penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan kepentingan dunia. Dengan demikian, prinsip ini memastikan bahwa penerapan hukum pidana Indonesia tetap sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ini juga dikatakan sebagai asas mengenai penyelenggaraan hukum dunia atau ketertiban hukum dunia (*weredrechtsorde)*

1. **Surat Dakwaan dan Tuntutan**

1. **Surat Dakwaan**
   1. **Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan, sebagai mahkota persidangan, memiliki peran yang sangat penting dan harus dijaga serta dipertahankan secara mantap oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan ini bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga merupakan dasar yang menjadi pijakan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi landasan pertimbangan bagi Hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Surat dakwaan merupakan rangkuman dari fakta-fakta yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk bukti-bukti yang menjadi dasar tuduhan terhadap terdakwa. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus menyusun argumen yang kuat dan menguraikan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, serta menjelaskan alasan hukum yang mendukung dakwaan tersebut.

Dalam persidangan, surat dakwaan menjadi panduan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim akan meneliti apakah fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Selain itu, Hakim juga akan mempertimbangkan argumen hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

Selanjutnya, surat dakwaan juga menjadi dasar bagi Hakim dalam bermusyawarah dengan anggota majelis hakim lainnya untuk mengambil putusan. Hakim akan mempertimbangkan isi surat dakwaan, bukti-bukti yang diajukan, serta argumen hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kesimpulan dan putusan akhir dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting dalam persidangan. Surat dakwaan menjadi dasar bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan, bermusyawarah, dan mengambil putusan. Oleh karena itu, penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan dengan seksama dan memastikan bahwa argumen yang disampaikan kuat dan fakta-fakta yang tercantum dapat dibuktikan secara sah.

Menurut Andi Hamzah, sulit untuk membuat pengertian atau defenisi surat dakwaan. Sebab undang-undang pun tidak memberi Batasan pengertian surat dakwaan. Umumnya diserahkan kepada praktik peradilan pidana dan yurisprudensi.[[42]](#footnote-42)

Namun Suyanto mendefenisikan, “Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan”.[[43]](#footnote-43)

Menurut Suyanto, pengertian yang disampaikannya telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Oleh karena itu, dalam definisi tersebut digunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah "didakwakan" dan "hasil pemeriksaan penyidikan" yang merupakan istilah baru yang telah diresmikan dan dibakukan dalam KUHAP. Dengan adanya penggunaan istilah-istilah ini, pengertian surat dakwaan menjadi lebih terstandarisasi dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.[[44]](#footnote-44)

Dengan demikian yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat yang berisi perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat ini mencakup identitas terdakwa, waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana, serta harus disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang terkait tindak pidana tersebut, termasuk dakwaan dan alat bukti yang digunakan, serta tuntutan pidananya. Kejelasan dan kecermatan dalam pembuatan surat dakwaan sangat penting bagi seorang Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Andi Hamzah, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan tetapi delik tersebut tidak didakwakan putusan ahrus berupa bebas *(vrijspaak).* Jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi ada dasar pembenar atau pemaaf, putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onstlag van alle rechts vervolging).[[45]](#footnote-45)*

Dari kutipan tersebut di atas, bisa diartikan jika dalam penyusunan surat dakwaan terdapat kekeliruan atau ketidakcermatan, maka dapat berakibat hukum berupa perkara yang diputusa bebas atau lepas dari segala tuntutan.

Kecermatan dan ketelitian seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menulis dan menjelaskan dakwaannya menjadi sangat penting dalam hal ini, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Kecermatan dan ketelitian mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

* 1. **Syarat-Syarat Surat Dakwaan**

Syara-syarat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpat tindak pidana itu dilakukan.

Jelas bahwa dalam penyusunan surat dakwaan, penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas. Artinya, rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, pengertian yuridis tentang tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi tujuannya, meskipun syarat materi terpenuhi, bisa disebut dakwaan ambigu atau dakwaan yang tidak memadai. Dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mengurangi keadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum perlu menghasilkan surat dakwaan yang terperinci, jelas, dan sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa.

Kaitannya dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga putusanNomor864/pid.sus/2023/pn-mdn, terdapat ketidakcermatan dalam syarat-syarat material yang terkait dengan pembuatan surat dakwaan. Hal ini dapat dilihat pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa terdakwa atas tuduhan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana melanggar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, dalam hal ini, dakwaan Jaksa Penuntut tidak cermat, karena Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, bukan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.

1. **Bentuk Surat Dakwaan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki ketentuan atau pasal yang secara spesifik mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan. Oleh karena itu, dalam praktik penuntutan, setiap Jaksa Penuntut Umum cenderung sangat dipengaruhi oleh strategi dan kepekaan estetika mereka sendiri, yang didasarkan pada pengalaman praktik yang mereka miliki.

Meskipun tidak ada ketentuan yang ketat, Jaksa Penuntut Umum tetap diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti kejelasan, keadilan, dan keakuratan dalam menyusun surat dakwaan. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan kepentingan publik dan memastikan bahwa surat dakwaan tersebut memadai untuk menggambarkan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam praktiknya, perbedaan dalam bentuk dan susunan surat dakwaan dapat terjadi antara satu Jaksa Penuntut Umum dengan yang lainnya, tergantung pada pengalaman, penekanan kasus, dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Namun, tujuan utama dari surat dakwaan tetaplah untuk menyajikan argumen hukum yang kuat dan mendukung tuntutan pidana yang diajukan.

Menurut M. Irsan Arief refleksi keadilan harus tercermin dalam penyusunan surat dakwaan, terkadang penuntut umum masih keliru dalam menentukan bentuk dakwaan, misalnya antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif. Terdakwa mestinya di siding dengan dakwaan alternatif namun menerapkan dakwaan kumulatif dan berptensi mencederai rasa keadilan, demikian pula sebaliknya.[[46]](#footnote-46)

Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan yakni :

* 1. Dakwaan Tunggal
  2. Dakwaan Subsider
  3. Dakwaan Alternatif
  4. Dakwaan Kumulatif
  5. Dakwaan Kombinasi[[47]](#footnote-47)

**Dakwaan Tunggal**, dalam dakwaan tunggal, hanya satu tindak pidana yang didakwakan berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara. Terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa ada dakwaan lain yang terkait..

**Dakwaan Subsider**, dalam dakwaan subsider, terdakwa hanya didakwa atas satu tindak pidana saja, meskipun ada beberapa tindak pidana yang mungkin terlibat. Hal ini membantu menghindari keraguan dalam kualifikasi tindak pidana dan pasal yang dilanggar. Dalam penyusunan dakwaan, tindak pidana dengan hukuman paling berat ditempatkan di lapisan atas, sedangkan tindak pidana dengan hukuman lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Jika satu dakwaan terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Meskipun terdapat beberapa tindak pidana dalam dakwaan, hanya satu tindak pidana yang akan dibuktikan.

**Dakwaan Alternatif**, dalam dakwaan alternatif, terdakwa didakwa atas lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada dasarnya hanya didakwa atas satu tindak pidana saja. Penggunaan kata "atau" dalam dakwaan ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang didakwakan saling mengecualikan. Dakwaan alternatif digunakan ketika Jaksa Penuntut Umum belum yakin tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terdakwa lolos dari dakwaan. Biasanya dakwaan alternatif digunakan ketika tindak pidana memiliki kesamaan atau hampir sama, seperti pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan sebagainya. Ciri khusus dari dakwaan ini adalah penggunaan kata sambung "atau" oleh Jaksa.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif karena mereka merasa bahwa perbuatan terdakwa masih ragu-ragu dan belum jelas mengenai kualifikasi dan pasal yang harus diterapkan dalam surat dakwaan

**Dakwaan kumulatif** , dalam dakwaan kumulatif, terdakwa didakwa atas beberapa tindak pidana secara bersamaan. Dakwaan ini digunakan ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana atau ketika beberapa orang melakukan satu tindak pidana. Biasanya, dakwaan akan dibagi menjadi dakwaan satu, dakwaan dua, dan seterusnya. Dakwaan kumulatif digunakan ketika terjadi akumulasi perbuatan atau akumulasi pelaku. Jaksa Penuntut Umum menerapkan dua pasal sekaligus dengan menggunakan kata sambung "dan".

**Dakwaan kombinasi**, dakwaan ini merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif, dan dakwaan subsidiair. Berdasarkan surat dakwaan yang dipaparkan oleh Sasangka, terlihat Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata "atau" dalam surat dakwaan, yang memberikan pilihan bagi terdakwa untuk dinyatakan bersalah atas salah satu atau beberapa dakwaan. Ini memberikan fleksibilitas bagi Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan dan memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan..

1. **Pembatalan Surat Dakwaan**

Menurut Maderburgh, pembatalan surat dakwaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

* 1. Pembatalan Formil *(Formele Nietigheid)*

Pembatalan ini adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan undang-undang, yang segera dapat dilihat undang-undang yang berslfat lahlr dan normatlf, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang (Pasal 142 ayat (2) jo. Ayat (3) KUHAP).

* 1. Pembatalan yang Hakiki *(Wezenlijke Nieticheld)*

Pembatalan yang disebut juga pembatalan essential atau pembatalan substansing. Pembatalan ini adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang dianggap essential. Umpamanya karena pembuatan surat dakwaan yang sedemikian tldak terang, sehingga dari lsinya tidak dapat dilihat dari surat dakwaan seperti dikehendaki oleh undang-undang. [[48]](#footnote-48)

1. **Surat Tuntutan**
   1. **Pengertian Penuntutan**

Pengertian penuntutan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Yang berwenang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP yang menyatakan, “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan, “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana” Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Namun tidak semua jenis perkara disertai surat tuntutan, karena dalam perkara yang sederhana tuntutan atau perkara ringan langsung saja jaksa penunut umum memohon tuntutan pidana kepada hakim, tanpa membuat surat tuntutan dan tuntutan pidana mana cukup dituliskan dalam formulir surat tuntutan.

Pada umumnya, dalam tuntutan pidana, terdapat penjelasan mengenai bagian-bagian dari ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti. Surat tuntutan juga menyertakan penjelasan mengenai setiap unsur dari delik yang didakwakan. Dengan demikian, surat tuntutan berfungsi sebagai gambaran atau visualisasi mengenai tuntutan hukuman yang akan diputuskan oleh Hakim.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa bergantung pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat kemungkinan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas terdakwa jika tidak cukup bukti yang ditemukan selama persidangan, atau jika terdapat kesalahan dalam penyajian bukti. Tuntutan dari penuntut umum, bisa berupa tuntutan pemidanaan, tuntutan lepas dari segala tuntutan atau tuntutan bebas.

Surat tuntutan harus memuat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu hal-hal yang menurutnya terbukti sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti lainnya, yang kemudian akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam sidang mengenai perkara yang telah diajukan. Dengan demikian, surat tuntutan dapat dianggap sebagai ringkasan atau kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai perkara yang diajukan.

Surat tuntutan diajukan kepada Hakim dan setelah dibacakan, harus diserahkan kepada Majelis Hakim. Meskipun begitu, surat tuntutan sebenarnya juga ditujukan kepada terdakwa karena berisi kesimpulan penuntut umum mengenai terdakwa tersebut, beserta tuntutan dan alasan-alasannya.[[49]](#footnote-49)

Isi surat tuntutan memiliki arti yang sangat penting bagi Hakim karena menjadi faktor pertimbangan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Surat tuntutan memberikan gambaran yang jelas tentang pandangan penuntut umum terhadap perkara yang sedang diadili, termasuk kesimpulan yang dihasilkan dari bukti-bukti yang disajikan. Bagi terdakwa, surat tuntutan memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan nasibnya, karena kesimpulan yang terdapat di dalamnya dapat mempengaruhi secara signifikan pertimbangan dan putusan Hakim. Oleh karena itu, surat tuntutan menjadi salah satu elemen kunci dalam proses peradilan yang harus diperhatikan dengan serius oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian fungsi surat tuntutan dapat dilihat dari tiga kepentingan (tiga dimensi), yaitu bagi jaksa penuntut umum sebagai landasan, apakah terdakwa dituntut pemidanaan, atau pelepasan dari segala tuntutan atau pembebasan. Bagi terdakwaa surat tuntutan menjadi bahan untuk pembelaannya, karena terdakwa dapat rneng-counter argumentasi Yang dimuat jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan bilamana tuntutannya pemindaan.

Bagi Hakim surat tuntutan dapat menjadi bahan atau memberi corak terbadap putusan yang akan dijatuhkan danjuga menjadi bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan menjadi bahan bagi keyakinannya.[[50]](#footnote-50)

Dalam konteks hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dan masyarakat, terutama korban, peran yang dimainkan sangatlah penting. Surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah memiliki kejelasan dan kecerahan yang tinggi, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah ditetapkan dalam persidangan. Surat tuntutan tersebut tidak hanya ditujukan kepada terdakwa dan hakim, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, namun tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, surat tuntutan menjadi alat bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga integritas peradilan.

Dengan demikian, surat tuntutan yang jelas dan terang dari Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan proposional antara kepentingan masyarakat di satu sisi dan pelanggar (pelaku tindak pidana) di sisi lain sebagai individu yang dijatuhi hukuman. Dalam proses peradilan, putusan hakim yang didasarkan pada surat tuntutan yang kuat dan berimbang dapat memastikan bahwa keadilan tercapai dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelanggar hukum. Dengan demikian, putusan hakim dapat menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan masyarakat dan individu yang melanggar hukum.

Meskipun Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai pihak dalam perkara pidana dan memiliki kebebasan dalam pertimbangan subjektif, mereka memiliki tanggung jawab untuk tetap berpegang pada tujuan objektif penegakan hukum. Tujuan tersebut adalah untuk menciptakan keadilan proposional berdasarkan kebenaran materiil saat mengajukan perkara ke Pengadilan. Dalam menjalankan tugas mereka, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti secara objektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar keadilan tercapai dalam sistem peradilan dan hak-hak semua pihak terlindungi dengan adil.

1. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**
2. **Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negative secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.[[51]](#footnote-51)

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga.

1. **Bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi :**
2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam konteks KDRT, menurut Pasal 8 UU KDRT, merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Ini juga mencakup pemaksaan hubungan seksual antara salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain, baik untuk tujuan komersial maupun tujuan lain yang ditentukan.

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 UU KDRT, kekerasan fisik dapat dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang.

1. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang.

1. Kekerasan Pelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 UU KDRT mengatur bahwa penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai tindakan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, meskipun secara hukum atau persetujuan mereka memiliki tanggung jawab tersebut. Selain itu, penelantaran juga mencakup tindakan seseorang yang membatasi atau melarang orang tersebut untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi bergantung secara ekonomi dan berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah diuraikan, ada beberapa yang digolongkan sebagai tindak pidana aduan *(klacht delicten en niet).* Tindak pidana aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.

Menurut Teguh Prasetyo, Delik aduan *(klachdelict)* adalah tindak pidana pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.*[[52]](#footnote-52)*

Kemudian Andi Hamzah juga mengatakan, bahwa tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan, pemukahan, dan lain sebagainya.[[53]](#footnote-53)

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang termasuk dalam kategori tindak pidana aduan telah diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Berikut adalah rincian yang mencakup:

* + 1. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
    2. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
    3. Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Meskipun secara teoretis perkara KDRT yang termasuk tindak pidana aduan bisa ditangani dengan mediasi penal, namun penegak hukum biasanya merujuk pada UU No. 23 Tahun 2004 dalam penanganannya.

1. **Pembuktian Dalam Tindak Pidana KDRT**

Pembuktian merupakan tahap krusial dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, di mana melalui proses ini, kebenaran tuduhan terhadap terdakwa dapat ditentukan. Proses ini melibatkan penyajian bukti yang sah oleh hakim untuk memastikan kebenaran peristiwa yang dituduhkan. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk membuktikan peristiwa tersebut dengan mengajukan bukti di pengadilan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim.

Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim harus memperhatikan beberapa aspek penting dalam hukum pembuktian, seperti memahami metode pembuktian, mengetahui beban pembuktian, mengidentifikasi alat bukti yang relevan dan sah, serta mempertimbangkan kekuatan dan validitas alat bukti tersebut untuk memastikan persidangan berjalan adil dan sesuai hukum.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, “Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”[[54]](#footnote-54)

Hukum Pembuktian adalah bagian integral dari hukum acara pidana yang membantu dalam proses penegakan hukum dengan menentukan bagaimana bukti dapat dipresentasikan dan dinilai di pengadilan. Ini membantu dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap*,*  “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”[[55]](#footnote-55)

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika ada minimal dua alat bukti yang sah yang meyakinkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya (Pasal 183 KUHAP).

Menurut Hadi Sasangka dan Uly Rosita, Tujuan dan manfaat pembuktian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan adalah sebagai berikut:

* + 1. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
    2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
    3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.[[56]](#footnote-56)

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah,

* 1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa

**1. Alat Bukti Keterangan Saksi**

Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan informasi yang berguna untuk proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait suatu kasus pidana berdasarkan apa yang mereka dengar, lihat, atau alami secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP..

Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testlmon ium de auditu. (Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

1. **Alat Bukti Keterangan Ahli**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Sedangkan yang disebut ahli adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). Keterangan seorang ahli tersebut dinyatakan di siding pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

1. **Alat Bukti Surat**

KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas tentang alat bukti Surat, namun dijelaskan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP). Surat yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam proses hukum. Ini berarti surat tersebut tidak dapat digunakan dalam pengadilan untuk membuktikan kesalahan atau membenarkan klaim. Keberlakuan bukti yang sah sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Oleh karena itu, setiap surat atau dokumen yang diajukan sebagai bukti harus memenuhi syarat-syarat hukum agar dapat diterima dan dianggap valid oleh pengadilan.

1. **Alat Bukti Petunjuk**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi.

b. Surat.

c. Keterangan terdakwa.

1. **Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Sedangkan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (189 ayat (3) KUHAP) dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. (Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

1. **Alat Bukti Elektronik**

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukti elektonik tidak termasuk salah satu alat bukti yang sah. Namun sehubungan dengan perkembangan zaman dan perundang-undangan bukti elektronik dengan beberapa persyaratan saat ini dapat diterima sebagai pertimbangan hakimdalam memutuskan perkara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 55 menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang sah yang sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, asalkan didukung dengan alat bukti sah lainnya. Penjelasan Pasal 55 menegaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan di luar hubungan suami istri, pengakuan terdakwa juga merupakan alat bukti yang sah.

Pembuktian terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan hanya mendengarkan keterangan saksi korban, atau dapat juga ditambah atau disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

1. **Unsur Dan Syarat Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Unsur-unsur tindak pidana umumnya dibagi menjadi dua bagian utama: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah niat atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hukum, ini sering disebut sebagai "mens rea", yang berarti "pikiran jahat". Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan keinginan untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan Unsur Objektif adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang sesuai dengan deskripsi tindak pidana dalam hukum. Unsur ini mencakup tindakan itu sendiri serta hasil dari tindakan tersebut.

Menurut P.A.F Lamintang, unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahtan-kejahatan pencurian, penipuan , pemersan pemalsuan, dll
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad seperti yang misalnya yang terdapat d dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdadapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkbeid;*
2. Kualitas dari si Pelaku, Misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri “ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus dari suatu perseroan terbatas “di dalam kejahatan menurut menurut Pasal 398 KUHP; ykani hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.[[57]](#footnote-57)

**1. Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik**

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 5 ( lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00; (Pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
2. Apabila kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000.00 (Pasal 44 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
3. Apabila kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (Pasal 44 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
4. Apabila kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
5. **Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Psikis**

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
2. Apabila kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak menyebabkan penyakit atau menghambat dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
3. **Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual**

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (Pasal 46 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
2. Apabila orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga itu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu maka pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Pasal 47 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
3. Apabila kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
4. Ancaman Pidana Bagi Pelaku penelantaran rumah tangga

Pelaku penelantaran rumah tangga dapat dipenjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa selain pidana yang telah disebutkan sebelumnya, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan ini dapat berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan, “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Artinya perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan ataumata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Untuk menuntut seseorang secara pidana, tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Artinya, ada syarat bahwa harus ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Unsur-unsur ini mencakup perbuatan melawan hukum, unsur subjektif seperti kesengajaan atau kecerobohan, dan unsur objektif seperti adanya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan. Hanya dengan memenuhi unsur-unsur ini, pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu

* + - 1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
      2. mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat.
      3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat. [[58]](#footnote-58)

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.[[59]](#footnote-59)

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah: Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.[[60]](#footnote-60)

Sedangkan tujuan hukuman Roeslan Saleh berpendapat bahwa tujuan hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana.[[61]](#footnote-61)

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :

* + 1. memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahatpenjahat potensial dalam masyarakat.
    2. pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
    3. pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.[[62]](#footnote-62)

Dalam studi hukum pidana, terdapat tiga jenis teori yang membahas tujuan pemidanaan, yaitu:

* + 1. **Teori pembalasan *(retributive/absolute*).**

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.[[63]](#footnote-63) Teori ini menyatakan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk memberikan pembalasan atau pengimbangan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan merugikan atau tindak pidana.

* + 1. **Teori relative atau tujuan**.

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pemidanaan sebagai pembalasan maka teori relative mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan[[64]](#footnote-64).

Teori ini berpendapat bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk memberikan hukuman kepada pelaku dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, baik oleh pelaku itu sendiri maupun oleh orang lain. Hal ini dilakukan melalui upaya prevensi khusus, yaitu mencegah pelaku melakukan tindakan kriminal lagi, dan prevensi umum, yaitu mencegah orang lain melakukan tindakan kriminal serupa.

* + 1. **Teori gabungan**

Selain teori absolut dan teori relatif yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat teori ketiga yang mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan meliputi pembalasan, penjeraan, dan pencegahan, serta perbaikan mentalitas pelaku tindak pidana.

**Kelemahan teori absolut:**

* + - 1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
      2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

**Kelemahan teori tujuan:**

* 1. Dapat menimbulkan ketidak adilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
  2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
  3. Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.[[65]](#footnote-65)

Pada dasarnya, ketiga aspek mengenai tujuan hukuman tersebut bertujuan untuk membentuk ketertiban dalam masyarakat, memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, serta mengendalikan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.

Adapun unsur dan syarat pemidanaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. **Tindakan Kekerasan:**

Unsur pertama dalam pemidanaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Tindakan kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. Semua bentuk kekerasan dalam KDRT memiliki dampak serius pada korban dan harus ditangani dengan serius oleh hukum.

1. **Hubungan Keluarga atau Rumah Tangga:**

Hubungan keluarga ini bisa meliputi hubungan suami-istri, mantan suami-istri, pasangan tidak menikah, anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, atau hubungan keluarga lainnya. Penting untuk diingat bahwa KDRT tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu dan dapat terjadi dalam berbagai jenis hubungan keluarga..

1. **Melanggar Undang-Undang:**

Tindakan kekerasan dalam KDRT harus melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan menetapkan larangan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

1. **Bukti yang Cukup:**

Untuk memidana pelaku KDRT, diperlukan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan hukum. Bukti ini dapat berupa laporan korban, bukti fisik, saksi, atau rekaman yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan.

1. **Proses Hukum yang Dilalui:**

Pemidanaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan melalui proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT. Kepolisian memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus KDRT, sedangkan jaksa bertanggung jawab untuk menuntut pelaku kekerasan di pengadilan. Pengadilan akan memutuskan sanksi yang sesuai berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan dalam persidangan. Selain itu, dalam proses pemidanaan KDRT, juga diperhatikan upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi korban agar dapat pulih secara fisik, mental, dan emosional.

**BAB III**

**DASAR HUKUM TUNTUTAN PENUNTUT UMUM**

**TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA KDRT**

* + - 1. **Jenis-Jenis Putusan Dalam Tindak Pidana KDRT**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan amar putusan terdapat tiga jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu

1. **Putusan bebas**

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa putusan bebas adalah keputusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa ketika hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan yang diajukan.

Putusan bebas terjadi ketika terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

74

Dakwaan dinyatakan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

1. **Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan**

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Dalam putusan pelepasan, meskipun tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, terdakwa tidak dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori "perbuatan pidana", melainkan masuk ke dalam lingkup hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

1. **Putusan pemidanaan**

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Selanjutnya Pasal 195 KUHAP menegaskan, “Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum” Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka tersebut dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan secara terbuka untuk umum”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur sanksi pidana bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berupa pidana kurungan, denda, dan tindakan tambahan seperti menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu, dan mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

* + - 1. **Kriteria Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara KDRT**

Surat Edaran Jaksa Agung No. SE.007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan kebijakan penting yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap perempuan. Kebijakan ini secara khusus mengatur penunjukan jaksa yang akan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT.

Dengan adanya surat edaran ini, jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara KDRT diharapkan memiliki pemahaman yang baik dan sensitivitas terhadap isu-isu gender dan hak asasi manusia. Edaran ini mencantumkan beberapa kriteria jaksa yang diizinkan untuk menangani perkara KDRT. Kriteria-kriteria tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa jaksa yang ditunjuk memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan efektif dan adil.

1. Telah berpengalaman sebagai penunutut umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat , perhatian dedikasi dan memahami masalah kekerasan terhadap perempuan.
3. Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkatra kekerasan terhadap perempuan (KDRT, perdagangan orang dan perlindungan anak) atau pernah mengikuti seminar tentang penanganan HAM, gender KDRT, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana terhadap perlindungan anak.
   * + 1. **Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara KDRT**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Artinya, hukum acara yang digunakan untuk menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. **Tahap Pra penuntutan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi yang jelas mengenai arti penuntutan. Namun, dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. melakukan penuntutan;
8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. melaksanakan penetapan hakim.

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, Kejaksaan akan memulai tugas prapenuntutan. Prapenuntutan melibatkan pemantauan perkembangan penyidikan, pemeriksaan kelengkapan berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, dan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan

Dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Jaksa Penuntut Umum setelah menerima SPDP (P.16) melakukan kegiatan berikut:

* 1. Memantau perkembangan penyidikan;
  2. Secara aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan Penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum ini digunakan secara optimal oleh Jaksa untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penyidik, dengan tujuan agar kegiatan penyidikan dapat menghasilkan data dan fakta yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan dan menghindari pengembalian berkas perkara.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Jaksa setelah menerima SPDP antara lain:

1. Siapa pelakunya dan siapa korbannya.
2. Apakah termasuk masuk dalam lingkup rumah tangga (Pasal 2 UU PKDRT).
3. Kasus posisinya apakah pelaku dapat dikenakan Pasal 44 ayat (1),ayat (2), dan ayat (3), Pasal 45 ayat (1),Pasal 46.Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 tentang UU P-KDRT.
4. Apabila pelaku dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, perbuatannya merumusi unsur pasal dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan tempus delietinya sesudah tanggal 22 September 2004, maka tindak pidana tersebut adalah tindak pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 tahun 2004 bukan KUHP.
5. SPDP tidak dilanjutkan dengan Berkas Perkara
   1. Dalam hal Apabila SPDP tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama dalam bataswaktu 30 hari, jaksa peneliti yang bersangkutan meminta laporan perkembangan penyidikan (P-17).
   2. Perpanjangan penahanan Pcnuntut Urnum mempunyai wewenang memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 14 c jo Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
   3. Penuntut Umum memberikan . perpanjangan penahanan Penuntut Urnurn menerima dan menelaah Resume penyidikan dan permohonan perpanjngan penahanan serta rnengajukan pertimbangan perlu tidaknya dilakukan perpanjangan penanahanan terhadap terdakwa yang bersangkutan.

Setelah berkas perkara diterima, Jaksa (P.16) segera mengadakan penelitian untuk menentukan, apakah berkas tersebut sudah rnernenuhi syarat formil dan syarat materiil d kan blanko *checklist*.

Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Tahap 1 Dalam waktu 7 hari setelah Berkas Perkara diterima, jaksa peneliti harus sudah menentukan sikap apakah berkas Iengkap atau belum. Bila lengkap, di buat P-21. Bila belum lengkap dibuat P-18 ditujukan kepada Penyidik (Pasal 138 (1) KUHAP)..

Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan berkas perkara guna menilai apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang diperlukan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa surat dakwaan telah disusun dengan benar dan lengkap, serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam pemeriksaan berkas perkara, Majelis akan mempelajari bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, dan semua dokumen terkait lainnya. Dengan melakukan pemeriksaan ini, Majelis dapat memastikan bahwa perkara yang akan disidangkan memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Syarat formil, nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.

Syarat - syarat materil,

1. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
2. Perbuatan yang didakwakan harus jelas di¬rumuskan unsur-unsurnya;
3. Hal-hal yang menyertai perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Syarat formil dan syarat materil merupakan syarat mutlak. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 3 KUHAP dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk yang diberikan (Pasal 110 ayat 2 KUHAP).dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tarnbahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP).

Sikap jaksa penuntut umum terhadap hasil penelitian berkas perkara dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Beberapa sikap yang mungkin diambil oleh jaksa/penuntut umum terhadap hasil penelitian berkas perkara antara lain:

1. Jika hasil penelitian berkas perkara belum lengkap, langkah-langkah yang dapat diambil adalah segera menerbitkan P-18 (Hasil penyelidikan belum lengkap) dan P-19 (Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). P-18 akan digunakan untuk mengindikasikan bahwa hasil penyelidikan belum lengkap, sedangkan P-19 akan digunakan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk untuk melengkapi.
2. Jika berkas perkara lengkap dan memenuhi syarat, langkah-langkah yang diambil adalah menerbitkan P-21 (Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) untuk menandakan berkas perkara telah lengkap. Selanjutnya, jaksa penuntut umum meminta agar tersangka dan barang bukti diserahkan kepadanya. Dalam P-21, jaksa penuntut umum biasanya menyertakan matriks dan rencana dakwaan (P-16) yang berisi rincian tuduhan dan bukti yang akan digunakan dalam proses penuntutan. Langkah-langkah ini memastikan proses penuntutan dapat dilanjutkan dengan berkas perkara yang siap diajukan ke pengadilan.
3. Berkas perkara bukan merupakan tindak pidana.
4. **Tahap Penuntutan**

Pasal 1 ayat (7) KUHAP, penuntutan merupakan tindakan dari penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Menurut Pasal 137 KUHAP, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut siapa pun yang dituduh melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya. Penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya.

Menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, penuntut umum mengajukan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadilinya, dan disertai dengan surat dakwaan. Penjelasan Pasal 143 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "surat pelimpahan perkara" mencakup surat pelimpahan perkara lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Penuntut Umum melakukan penyempurnaan terhadap Rencana Dakwaan (Rendak) dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya surat dakwaan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa secara teliti dan memastikan bahwa semua persyaratan yang diperlukan untuk surat dakwaan terpenuhi.

Fungsi surat dakwaan bagi Penuntut Umum, Hakim, dan Terdakwa/Penasihat Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, surat dakwaan memiliki fungsi sebagai alat untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan menjadi dokumen resmi yang digunakan oleh penuntut umum untuk mengajukan kasus ke pengadilan dan sebagai dasar pembuktian dan analisis yuridis yang berisi rincian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
2. Bagi pengadilan atau hakim, surat dakwaan memiliki peran yang penting. Surat dakwaan menjadi dasar yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan pidana.
3. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, surat dakwaan menjadi dasar untuk mempersiapkan pembelaan, menyiapkan bukti-bukti yang dapat menguatkan argumen bahwa apa yang didakwakan terhadapnya tidak benar (Pasal 156 ayat 1 KUHAP).

Baik KUHAP maupun UU No. 23 Tahun 2004 tidak memberikan ketentuan mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan dalam perkara KDRT. Oleh karena itu, penuntut umum sebaiknya mengikuti pedoman atau prinsip yang ingin diikuti oleh penuntut umum.

**3, Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan**

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan juga disampaikan kepada tersangka, kuasanya, penasihat hukumnya, dan penyidik secara bersamaan (Pasal 143 ayat 4 KUHAP). Penuntut umum yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelimpahan perkara ke pengadilan (P.16 A).

Jangka waktu pelimpahan perkara tindak pidana KDRT adalah paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Jangka waktu pelimpahan perkara yang sulit pembuktiannya adalah paling lama 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Jika tersangka perlu dilakukan perpanjangan penahanan, permintaan perpanjangan penahanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 10 hari sebelum masa penahanan berakhir.

Dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Penuntut Umum bertanggung jawab atas seluruh proses persidangan, termasuk membacakan dakwaan, tanggapan eksepsi, pembuktian, surat tuntutan, replik, pengajuan upaya hukum, dan tindakan lain yang diperlukan dalam penyelesaian penanganan perkara.

Setelah pemeriksaan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum segera membuat Surat Tuntutan Pidana dan mengajukan rencana tuntutan pidana secara berjenjang sesuai dengan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara.

Terkait dengan surat tuntutan, KUHAP tidak mengatur syarat mengenai bentuk, sistematika, dan isi tuntutan pidana. Namun, dalam prakteknya, penuntut umum menyusun surat tuntutan dengan mengacu pada syarat-syarat penyusunan surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, e, f, h, i, k, l KUHAP.

Perbuatan terdakwa, keadaan diri, dan dampak perbuatan terdakwa dapat menjadi alasan untuk menentukan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan tuntutan pidana terhadap pelaku. Hal-hal ini menjadi pertimbangan dalam menentukan tuntutan pidana.

**D. Dasar Hukum Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak dapat diterima Dalam Perkara Putusan Nomor 864/pid.sus /2023/pn-mdn**

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan,

*“*Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Dari penjelasan KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menegakkan keadilan, hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban warganegara tidak boleh diabaikan oleh siapapun, termasuk warganegara, penyelenggara negara, institusi pemerintah, dan organisasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini juga perlu direalisasikan melalui hukum acara pidana.

Di dalam penjelasan KUHAP, terdapat azas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Beberapa asas tersebut antara lain:

* + 1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
    2. Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undangundang,
    3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
    4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
    5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
    6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang sematamata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
    7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
    8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
    9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
    10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara

pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Surat dakwaan berperan sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam persidangan pengadilan. Pasal 143 ayat (3) KUHAP) menegaskan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
   * + 1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
       2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Surat dakwaan harus akurat, yang berarti Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tanpa adanya kekurangan atau kesalahan yang dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

Surat dakwaan juga harus jelas, artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur\_unsur pelanggaran yang didakwa serta menggabungkannya dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Selain itu, surat dakwaan juga harus lengkap, artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur yang diatur secara lengkap oleh undang-undang.

Penuntutan adalah langkah yang diambil oleh Penuntut Umum untuk mengajukan perkara pidana kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP.

Selanjutnya dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan, terdapat tiga bentuk putusan:[[66]](#footnote-66)

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas; dan
3. Putusan pemidanaan.

Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” Jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Untuk mengetahui putusan Nomor 864/pid.sus /2023/pn-mdn tentang tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga kita lihat dulu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum dengan Nomor Reg. Perk : PDM-124/Enz.2/12/202. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal rnelanggar Pasal 45 Undang Undan RI Nornor 23 Tahun 20()4 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu, “Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

1. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004;
2. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), bukan diatur dalam Pasal 45 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena ketentuan Pasal 45 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah*).*
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sedangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan Nomor Reg. Perk : PDM-124/Enz.2/12/202, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 Undang-Undang RI Nornor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga majelis hakim berpendapat surat dakwaan penuntut umum tidak dibuat secara cermat dan tidak memenuhi syarat materil surat dakwaan sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Karena surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan maka surat dinyatakan batal demi hukum, maka penuntutan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* .

Dalam Perkara Nomor 864/pid.sus /2023/pn-mdn, jaksa membuat dakwaan tunggal. Jaksa biasanya memilih membuat dakwaan tunggal daripada dakwaan alternatif karena dakwaan tunggal memberikan kejelasan dan fokus pada kasus yang disampaikan kepada pengadilan. Dengan dakwaan tunggal, jaksa dapat menyajikan bukti yang konsisten dan mendukung satu tuduhan utama tanpa membingungkan para pihak yang terlibat dalam persidangan. Dalam beberapa kasus tertentu, jaksa juga dapat mempertimbangkan untuk menyampaikan dakwaan alternatif jika terdapat bukti yang mendukung untuk tuduhan yang berbeda sebagai langkah antisipasi jika dakwaan utama tidak terbukti. Beberapa pertimbangan yang mungkin dipertimbangkan oleh jaksa antara lain, kecukupan bukti untuk mendukung dakwaan utama dan alternatif, jaksa akan memastikan bahwa dakwaan utama dan alternatif yang disampaikan konsisten dan logis berdasarkan fakta yang ada dalam kasus tersebut, meskipun hasilnya putusan majelis hakim tidak sesuai harapan karena surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum sehingga penuntutan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XX/2022, telah memberikan penafsiran baru terhadap frasa “batal demi hukum” Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Mahkamah Konstitusi untuk dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum frasa frasa “batal demi hukum” Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim

Putusan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* dalam KUHAP Indonesia berlaku di tingkat peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri), tingkat banding (pengadilan tinggi), dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Putusan ini dapat diberikan oleh pengadilan mana pun dalam rangkaian proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pedoman, dalam Rapat Pleno kamar pidana merumuskan, permohonan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya menyatakan permintaan/permohonan banding Terdakwa atau penuntut umum tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* karena pengajuan bandingnya melebihi jangka waktu dalam Pasal 233 Ayat 2 KUHAP, Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

Dalam Perkara Nomor 864/pid.sus/2023/pn-mdn, setelah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan majelis hakim, jaksa penuntut umum tidak mengajukan permohonan banding. Konsekuensi dari keputusan jaksa penuntut umum yang tidak melakukan banding dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka penuntut umum dianggap menerima putusan yang telah diucapkan majelis hakim dan menjadi keputusan akhir dari proses peradilan tersebut (inkracht).

Berdasarkan penelusuran peneliti, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak ditemukan adanya sanksi yang secara khusus ditetapkan bagi jaksa penuntut umum yang memutuskan untuk tidak mengajukan banding terhadap suatu putusan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum, keputusan untuk tidak melakukan banding dapat menjadi hak atau pilihan yang sah bagi jaksa penuntut umum tanpa ada sanksi yang secara eksplisit dikenakan dalam kasus tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara pidana Indonesia mengadopsi sistem pembuktian negatif yang mengharuskan penggunaan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta keyakinan hakim untuk menjaga keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Ini terdapat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dalam Perkara Nomor 864/pid.sus/2023/pn-mdn ini, hakim memutuskan tuntutan penuntutan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)* karena surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil. Dengan demikian dalam perkara ini Hakim membuat putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena berdasarkan sistem pembuktian pidana negatif di mana jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang wajar. Jika bukti yang disajikan tidak cukup meyakinkan dan ada keraguan mengenai kesalahan terdakwa, hakim menggunakan prinsip *in dubio pro reo* yang menyatakan bahwa terdakwa harus dianggap tidak bersalah.

**BAB IV**

**PERTIMBANGAN HAKIM TUNTUTAN PENUNTUT UMUM**

**TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PUTUSAN**

**NOMOR 864/PID/.SUS/2023/PN-MDN**

* + 1. **Posisi Kasus**

Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn dengan terdakwa Zurnivan Purnama, S.E., M.Si, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan strata 2 (S2), pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kenanga Raya, Gg. Zig Zag No.2 A Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Medan.

Terdakwa Zurnivan Purnama, S.E., M.Si ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn tanggal 11 Mei 2023.dan Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat sebagai berikut :

Terdakwa Zurnivan Purnama, S.E., M.Si, dan saksi korban Rifaidah Fajrina yang juga merupakan isteri Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021 atau setidak-tidaknya Tahun 2022 bertempat di Jalan Darma No. 8 Medan Helvetia atau pada tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu larangan untuk tidak mengabaikan atau mengabaikan anggota keluarga mereka. Ini berarti bahwa seseorang harus memberikan perhatian, perawatan, dan dukungan yang diperlukan kepada anggota keluarga mereka.

94

Kekerasan dalam rumah tangga yang didakwakan kepada terdakwa berawal dari dari mertua terdakwa Cut Fitri Hasan pindah ke rumah terdakwa dan saksi korban Rifaidah Fajrina sejak bulan Mei 2021, dimana setelah itu terdakwa lebih sering berkomunikasi dengan ibunya sehingga terdakwa jarang berkomunikasi dengan saksi korban Rifaidah Fajrina. dan terdakwa jadi lebih suka. marah-marah dan emosi kepada saksi korban Rifaidah Fajrina.

Pada tanggal 14 Junl 2021, saat terdakwa sedang bersama ibunya di luar, saksi korban Rifaidah Fajrina menitipkan kepada terdakwa untuk membellkan pampers anak dengan mereka, namun ketika terdakwa pulang pampers yang dibeli temyata berbeda dengan yang saksi korban titipkan, lalu terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban. Meski di situ ada ibu terdakwa namun ibu terdakwa hanya diarn dan masuk ke dalam kamar. Setelah itu, terdakwa dan saksi korban tidak berkomunikasi beberapa hari hingga akhirnya korban Rifaidah Fajrina bertanya kepada terdakwa ·”ini kayak mana kita kok dingin-dinginan saja” lalu terdakwa menjawab "intropeksi diri aja sendiri” lalu saksi korban Rifaidah Fajrina menjawab “intropeksl sama-sama aja” lalu terjadi pertengkaran hingga terdakwa mengusir saksi korban Rifaidah Fajrina dengan mengatakan “yauda pergi aja kau ke rumeh ibu mu”. Kemudian meminta ibu terdakwa untuk menjadi penengah namun lbu terdakwa malah menyalahkan dan mengatakan “aku enggak peduli ... itu urusan kalian ... kau pun keras kepala juga” mendengar hal tersebut saksi korban Rifaidah Fajlina pun langsung pergi ke rumah orang tua saksi korban.

Tanggal 09 Desember 2021 saksi korban Rifaidah Fajrina kembali rumah dan ketika akan membuka pintu rumah terdakwa langsung menghalangl saksi korban dengan mengatakan “mau ngapain?” lalu saksi korban menjawab "mau masuk ke dalam rumah” terdakwa menjawab “ooh, gak bisa selesaikan dulu ke pengadilan”, lalu saksi korban menjawab "loh kenapa ke pengadilan?” ini kan masih rumah Saksi Korban dan barang-barang di dalam juga masih hak Saksi Korban” dan terdakwa langsung berteriak mengatakan “maling…maling” kemudlan saksi Erwin Sahputra yang sedang menunggu di dalam mobil langsung keluar dan menengahi saksi korban dan terdakwa, kemudian saksi Erwin Sahputra langsung meminta saksi korban masuk ke dalam mobil dan meninggalkan terdakwa. Perbuatan terdakwa ini membuat saksi korban merasa keberatan lalu membuat laporan ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan *Vissum Et Revertum Psychiatricum* Nomor : VERSPSI/204/IV/2022/RS BHAYANGKARA tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara TK II Medan dan ditandatangani oleh Prof Dr.dr Elmeida Effendy, Mked,Sp.KJ(K) disebutkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rifaidah Fajrina, dengan kesimpulan “pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dapat disimpulkan terjadi kekerasan psikis dalam masa pernikahan, yang mana subjek selalu merasa tertekan dan terpojokkan”;

Perbuatan terdakwa sebagalmana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Pasal 5 huruf Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.
   * 1. **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Adapun dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn. Penuntut Umum telah menghadirkan bukti dan kesaksian dari saksi-saksi serta terdakwa ke pengadilan dan Penuntut umum mengajukan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zurrifan Purnama, S.E, M.Si telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Zurrifan Purnama, S.E, M.Si berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti : nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000; (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zurrifan Purnama, S.E, M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 45 UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menyatakan Terdakwa Zurrifan Purnama, S.E, M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukam tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf b Jo. Pasal 7 UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Menyatakan Terdakwa Zurrifan Purnama, S.E, M.Si dibebaskan dari segala Dakwaan *(Vrijspraak).*
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Keputusan hakim sangat penting dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu kasus. Keputusan hakim sangat bermanfaat bagi pelaku untuk menerima hukuman atas perbuatannya. Dalam membuat keputusan, hakim harus menggunakan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai pembuktian dari elemen suatu kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan kejahatan yang didakwa oleh penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan perkara Nomor: 864/Pid.Sus/2023/PN.Mdn menyatakan :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: ·1100/Pid.Sus/2023PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 yang amamya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari penasihat hukum Terdakwa Zurrifan Purnama, S.E, M.Si tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 864/Pid.Sus/2023/PN.Mdn atas nama Terdakwa Zurrifan Purnama, S.E, M.Si tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbagan apakah perbuatan berdasarkan fakta-fakta hukum dan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti secara cermat dan seksama apakah dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan.

Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2023 dimana dalam uraiannya Penuntut Umum membuktikan Pasal 49 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 32 Tahun 2004 tentang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sementara didalam dakwaannya Pasal 45 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menurut Pasal 182 ayat (3) KUHAP menyebutkan, jika sidang sudah dinyatakan ditutup oleh hakim, maka selanjutnya hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan bila perlu musyawarah itu dilakukan setelah terdakwa, penuntut umum, saksi, penasehat hukum dan hadirin meninggalkan ruang siding.

Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbuktl dalam pemeriksaan disidang. Berdasarkan pertimbangan pasal tersebut, putusan Majelis Hakim berdasarkan kepada surat dakwaan, maka surat dakwaan harus disusun berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan tersebut didukung dengan yurisprudensi tetap, doktrin dan norma hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan (acuan) untuk menguji apakah surat dakwaan memenuhi syarat formil dan materil adalah Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang rneliputi syamt formal dan syarat materiil, yang mengatur Penuntut Urnum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, ,ienis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengann menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyebutkan Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b KUHAP batal demi hukum. Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut telah terkandung syarat--syarat dakwaan yaitu sebagai berikut :

1. Syarat formal, diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHAP yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum serta memuat identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tgl. Lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Apabila syarai formal tersebut tidak dipenuhi maka akan menyebabkan dakwaan kabur /*abscuurlibele* atau identitas Terdakwa menjadi tidak jelas;
2. Syarat materiil, diatur dalam Pasai 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP. yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakannya dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana ltu dilakukan;

Surat dakwaan disusun secara cermat artinya ketika Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan didasarkan pada aturan hukum/Undang-Undang yang bertaku/yang tepat bagi Terdakwa dan tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal atau tidak dapat dibuktikan misalnya: apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tlndak pidana tersebut, apakah perkara ini sudah daluarsa atau belum, dan lain-lain.

Surat dakwaan disusun dengan jelas artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan;

Surat dakwaan tersebut disusun dengan lengkap artinya uraian surat dakwaan harus mencakup samua unsur-unsur yang ditentukan daIam rumusan Undang-Undang secara lengkap. Semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan. Apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum / *Null and void.* Sehingga apabila surat dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat, jelas dan !engkap serta tidak rnenyebutkan tempat / locus dan waktu / tempos tindak pidana tersebut dilakukan, maka akan berakibat surat dakwaan Penuntut Umum tersebut batal demi hukum / dinyatakan batal;

Jaksa Agung Republlk Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 19 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAMPIDUM No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994 merumuskan bahwa surat dakwaan agar:

1. Cermat didasarkan pada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijk Verkaard);*
2. Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pldana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematik dan kronologis dengan bahasa yang sederhana:
3. Lengkap, didasarkan uraian yang buat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menyusun uraian secara cermat, jelas dan tengkap tersebut dapat dllakukan dengan cara sebagai berikut :

Dalam membuat surat dakwaan dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut atau surat dakwaan dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan berkaitan satu sama lain sehingga tergambar secara Jelas bahwa semua unsur tindak pidama tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan tersabut.

Dari uraian tersebut maka suatu surat dakwaan dikatakan cermat, jelas dan lengkap terdakwa yang mendengar dan melihat atau yang membacanya akan rnengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, rumusan secara lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta terdakwa memahami tindak pidana terjadi kapan dan dimana yang didakwakan kepadanya;

Setelah Majelis Hakim rnembaca dan mencermati surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Reg. Perk: PDM-124/Enz.2/12/202, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal rnelanggar Pasal 45 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaannya karena surat dakwaan tersebut Terdakwa didakwa melakukan perbuatan, *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang da!am lingkup rumah tangganya”* sebagaiman melanggar Pasal 45 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Temyata perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tehadap Terdakwa, *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang. dalam lingkup rumah tangganya"* diatur dalam Pasal 49 Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan :

Dipidana dengan pidana penjara. paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.-000.000100 (lirna belas juta rupiah), setiap orang yang:

1. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1):
2. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2);

bukan diatur dalam Pasal 45 Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena ketentuan Pasal 45 Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang;

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan pslkis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatari sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak memimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 864/Pid.Sus/2023/Pn-Mdn berpendapat oleh karena ada kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dalam hat tidak sinkron antara uraian unsur Pasal yang didakwakan dengan ketentuan Pasal yang didakwakan sehingga Majelis Hakim menilai surat dakwaan Penuntut Umum tidak didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat secara cermat dan tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuritut Umum tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan, maka surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena surat dakwaan telah dinyatakan batal demi hukum, maka Penuntutan dinyatakan tidak dapat *diterima (Niet Onvankelijk verklaard);*

Bahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntut Penuntut Umum terhadap perkara pidana Nomor : 864/Pld.Sus/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa Zurrivan Pumama, S.E., M.Si. tidak dapat diterima *{Niet Onvankelijk verklaard)*;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara; Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abet. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023.

**Kaidah Putusan :**

Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaannya karena dalam surat dakwaannya terdakwa didakwa melakukan perbuatan menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ternyata Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan mengatur tentang perbuatan kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga

* + 1. **Analisis akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dan Tuntutan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**

Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 864/pid.sus /2023/pn-mdn Majelis Hakim berpendapat dalam menyusun dakwaan, Penuntut Umum tidak tidak sinkron antara uraian unsur Pasal yang didakwakan dengan ketentuan Pasal yang didakwakan. Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan, *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang da!am lingkup rumah tangganya”*, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dakwaan Penuntut Umum temyata perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tehadap Terdakwa tersebut bukan diatur di dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melainkan diatur pada Pasal 49 Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

* 1. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  2. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Sedangkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatari sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak memimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan antara uraian unsur Pasal yang didakwakan dengan ketentuan Pasal yang didakwakan sehingga Majelis Hakim menilai surat dakwaan Penuntut Umum tidak didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku. Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat secara cermat dan tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, karena surat dakwaan telah dinyatakan batal demi hukum, maka penuntutan dinyatakan tidak dapat *diterima (Niet Onvankelijk verklaard)* danmenyatakan penuntutan penuntut Umum terhadap perkara pidana Nomor : 864/Pld.Sus/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa Zurrivan Pumama, S.E., M.Si. tidak dapat diterima *{Niet Onvankelijk verklaard)*.

Dengan adanya pemaknaan baru dari Mahkamah Konstitusi terhadap norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka terhadap kasus yang saat ini sudah dinyatakan surat dakwaan JPU tidak sah atau batal menurut hukum, baik satu kali atau lebih oleh hakim, maka dapat diajukan untuk satu kali lagi dan kemudian hakim memeriksa bersama dengan materi

Menurut peneliti penuntut umum mempunyai kewajiban untuk mempelajari berkas perkara secara utuh dan saksama, kesalahan dalam menyusun Surat Dakwaan yang tidak sesuai dengan berkas perkara berakibat dakwaan batal demi hukum dan konsekuensi terhadap Surat Dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dan tuntutan tidak diterima oleh Putusan Pengadilan berakibat Terdakwa ini berpotensi mencederai rasa keadilan bagi korban. Sedangkan bagi Terdakwa Zurrivan Pumama, S.E., M.Si putusan dakwaan batal demi hukum dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga rasa keadilan bagi Terdakwa.

Ada beberapa faktor yang kemungkinan dapat menyebabkan jaksa penuntut umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan, terkait hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 2 narasumber yaitu :

**Advokat Ahmad Fadly Roza, S.H., M.H.**

Apa yang menyebabkan jaksa penuntut umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan ?

1. Jaksa penuntut umum terkadang menghadapi keterbatasan waktu dikarenakan sedang menangani banyka kasus, akibatnya membuat mereka menjadi terburu-buru dalam menyusun surat dakwaan, kurang teliti dalam mengumpulkan bukti, dan merumuskan dakwaan.
2. Jaksa penuntut umum mungkin kurang berpengalaman atau memiliki pengetahuan hukum terbatas terkait perkara atau kasus yang sedang ditanganinya sehingga mungkin tidak dapat menyusun surat dakwaan dengan cermat, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam merumuskan dakwaan atau mengumpulkan bukti-bukti.
3. Kurangnya koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik dalam menangani sebuah kasus dapat menyebabkan masalah terkait kelengkapan informasi untuk surat dakwaan. Kurang bersinergi antara jaksa penuntut umum dan penyidik juga berpotensi membuat surat dakwaan tidak lengkap atau tidak akurat.

**Advokat Dedy Pranajaya, S.H.**

Kenapa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan ?

* + - 1. Terkadang, jaksa penuntut umum memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan penyelidikan yang detail, sehingga mempengaruhi kualitas surat dakwaan yang dibuat mereka.
      2. Bisa juga, mungkin Jaksa penuntut umum sedang menghadapi tekanan pekerjaan dari atasan atau oleh pihak lain yang berkepentingan. Ini juga bisa mempengaruhi kualitas surat dakwaan yang mereka buat.

Dalam Perkara Nomor 864/pid.sus/2023/pn-mdn ini Hakim tidak mengabulkan eksepsi dari Kuasa hukum terdakwa, padahal jika eksepsi dikabulkan jaksa penuntut umum masih dapat memperbaiki dakwaan dan perkara tidak berlanjut sampai pada tuntutan dan putusan. Namun, hakim mungkin memiliki pertimbangan lain. Keputusan hakim untuk tidak menyetujui eksepsi dari kuasa hukum terdakwa bisa jadi berdasarkan pada evaluasi hukum dan fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Eksepsi memang bisa menghentikan tuntutan, makanya hakim harus mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan akhir. Kalau hakim menganggap eksepsi tidak memadai atau tidak sesuai dengan hukum dan fakta kasus, maka eksepsi tersebut tentu tidak akan diterima. Selain itu, hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Itu sebabnya, meskipun eksepsi berpotensi menghentikan perkara sebelum tuntutan diajukan, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan fakta yang terkait dalam kasus tersebut.

**BAB V**

**PENUTUP**

* + - * 1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Pemidanaan KDRT berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memiliki unsur dan syarat yang harus dipenuhi. Tindakan kekerasan harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam hubungan keluarga atau rumah tangga. Pelanggaran terhadap undang-undang ini meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. Untuk memidana pelaku, diperlukan bukti yang cukup seperti laporan korban, bukti fisik, saksi, atau rekaman. Proses hukum melibatkan kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Pemidanaan KDRT berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dalam membuat hukum menurut teori Kepastian Hukum Menurut Lon Fuller. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, pengumuman peraturan secara layak, tidak berlaku surut, jelas dan terperinci, tidak meminta hal yang tidak mungkin dilakukan, tidak ada pertentangan dengan peraturan lain, tetap dan stabil, serta tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dengan demikian pemidanaan KDRT berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dalam membuat hukum menurut teori Kepastian Hukum Menurut Lon Fuller.

112

1. Dasar hukum penolakan tuntutan penuntut umum adalah kurangnya kecermatan dalam menyusun dakwaan. Dakwaan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Surat dakwaan tersebut tidak dibuat dengan cermat dan tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Keputusan penolakan tuntutan penuntut umum didasarkan pada kurangnya kecermatan dalam menyusun dakwaan. Penting untuk menyusun dakwaan dengan cermat dan memenuhi persyaratan hukum agar pembuktian pidana dapat dilakukan dengan baik. Dalam konteks teori pembuktian pidana negatif, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika bukti yang digunakan secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim terhadap eksistensi bukti tersebut. Jadi, keakuratan dalam menyusun dakwaan dan memenuhi persyaratan hukum sangat penting dalam pembuktian pidana
2. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim menyimpulkan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, penuntutan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijk verklaard)* dalam perkara pidana Nomor 864/Pld.Sus/2023/PN Mdn terhadap Terdakwa Zurrivan Pumama, S.E., M.Si. Teori H.L.A Hart tentang prinsip keadilan menekankan pentingnya kecermatan dalam menyusun dakwaan dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, hakim mengacu pada prinsip keadilan Hart dengan menilai bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam konteks ini, prinsip keadilan Hart menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara bagi semua individu dalam masyarakat. Dengan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan tidak dapat diterima, hakim memastikan bahwa prinsip keadilan terpenuhi dan hukum dijalankan dengan tepat. Artinya dalam perspektif terdakwa putusan hakim sudah tepat dan adil, namun bagi korban putusan ini telah mencederai rasa keadilan korban.
   * + - 1. **SARAN**

Dari hasil penelitian ini , maka penulis ingin memberikan saran yang bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum yang mengatur KDRT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Indonesia bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, pengadilan, dan organisasi non-pemerintah. Mereka melakukan edukasi kepada masyarakat tentang KDRT, memberikan informasi yang akurat mengenai kesetaraan gender, serta berupaya menghilangkan stigma terkait KDRT. termasuk informasi untuk memastikan bahwa pelaku KDRT diadili dan dihukum dengan tegas.
2. Untuk meminimalisir ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan Jaksa penuntut umum perlu melakukan penelitian yang mendalam dan persiapan yang matang sebelum menyusun dakwaan. Pahami dengan baik ketentuan hukum yang berlaku dan pastikan dakwaan sesuai dengan persyaratan materiil yang ditetapkan. Penunutut umum juga perlu berkolaborasi dengan penyidik dan ahli hukum untuk dapat membantu dalam memahami kasus dengan lebih baik dan menyusun dakwaan yang kuat sehingga dakwaan yang disusun sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku.
3. Untuk meningkatkan kualitas penyusunan surat dakwaan dan memastikan kecermatan dalam proses penyusunan, dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku institusi Kejaksaan diharpakan perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada jaksa penuntut umum, melakukan sistem pengawasan dan evaluasi internal yang efektif untuk memastikan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum memenuhi persyaratan hukum yang berlaku serta menetapkan standar operasional prosedur yang jelas dan komprehensif dalam penyusunan surat dakwaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - * 1. **BUKU**

Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana, 2012.

Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 2016.

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Andi Sofyan dan Nur Azisa*, Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena Press, 2016.

Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang : Umrah Press, 2020.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Cirebon : Djava Sinar Perkasa, 2022.

Febrina Annisa dan Yetisma Saini, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tanggerang : Nusantara Persada Utama, 2017.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi,* Bandung, : Mandar Maju, 2020.

116

Hasanal Mulkan, *Buku Ajar kapita Selekta Hukum Pidana*, Palembang : Noer Fikri, 2022.

John Rawls, A Theory Of Justice, Teori Keadilan. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke 3 2019.

Joko Sriwidodo, *Pengantar Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Kepel Press, cet ke 1, 2021.

Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Kepel Press, 2020.

Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Prespektif Teori Keadilan*, Semarang:: UnnesPress, 2016.

Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Semaranag : Pustaka Magister, 2018.

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. citra Aditya Bakti, 2019.

Moh Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, Cet ke-1 2023.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2019.

Muladi, Penerapan Asas Retroaktif dalam hukum Pidana di Indonesia, Makalah Seminar Nasional “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, kerjasama FakultasHukum UNDIP Semarang dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Semarang, 26-27 April 2004.

M.Irsan Arief, *Memahami kesalahan Penyusunan Surat dakwaan* (Studi kasus 25 Perkara Pidana), Jakarta : Mekar Cipta Lestari, 2023.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan* *Sidang Pengadilan*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung :Pustaka Reka Cipta, 2019.

Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta : Grasindo. 1995.

P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok:Rajawali Pers, 2019.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Pers, cet-ke-1, 2014.

Sofia Hardani, dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru : PSW UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana* 1, Semarang : Yayasan Sudarto, 2018.

Suyanto, *Hukum Acara Pidana, Sidoarjo* : Zifatama Zawara, 2018.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok : RajaGrafindo Persada , 2019.

Tim Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo, Cetakan Ketiga, 2019.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sangir Multi Usaha, 2022.

Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Nusa Media, 2020.

Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, cet ke-13, 2023.

Zulfa Simatur Rafiah’ah, *Buku Panduan Siswa UUD Negara Repblik Indonesia 1945*, Jakarta :Tangga Pustaka, 2019.

* + - * 1. **JURNAL**

Dahriyanto Iman, *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatkan Obcuur Libel Oleh hakim*, Jurnal Lex Crimen, Vol 3 No.5, 2016

Heni Marlina, *Pengaruh Global Terhadap Pembaruan Hukum Nasional, Jurnal Varia Hukum*, Vol 30 No.39, 2018.

I.Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Prioris, Vol.3 No.2, 2016.

* + - * 1. **WEBSITE**

Annisa Medina Sari, *Rule Of Law: Pengertian, Tujuan dan Prinsipnya*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/rule-of-law-pengertian-tujuan-dan-prinsipnya/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024

Mukti Ali., *Makalah Perbandingan Konsep Negara Hukum*, diakses dari <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

1. Zulfa Simatur Rafiah’ah, *Buku Panduan Siswa UUD Negara Repblik Indonesia 1945*, Jakarta :Tangga Pustaka, 2019, hal. 21 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mukti Ali., *Makalah Perbandingan Konsep Negara Hukum*, diakses dari <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023. hal .6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Kepel Press, 2020, hal. 63 [↑](#footnote-ref-3)
4. Annisa Medina Sari, *Rule Of Law: Pengertian, Tujuan dan Prinsipnya*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/rule-of-law-pengertian-tujuan-dan-prinsipnya/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zulfa Simatur Rafia’ah, Op.Cit, hal. 47. [↑](#footnote-ref-5)
6. Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung :Pustaka Reka Cipta, 2019, hal. 27**.** [↑](#footnote-ref-6)
7. Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Nusa Media, 2020, hal. 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. I.Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Prioris, 2016 3 (2) : 128 [↑](#footnote-ref-8)
9. Joko Sriwidodo, *Pengantar Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogjakarta : Kepel Press, cet ke 1, 2021, hal. 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Tim Redaksi Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo, Cetakan Ketiga, 2019, hal. 768 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dahriyanto Iman, *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatkan Obcuur Libel Oleh hakim*, Jurnal *Lex Crimen*, 2016 3 (5) :29 [↑](#footnote-ref-11)
12. Moh Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, Cet ke-1 2023, hal 68-69 [↑](#footnote-ref-12)
13. Moh Askin dan Masidin, *ibid*. hal 63. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. citra Aditya Bakti, Cet ke 12, 2019, hal. 36 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-15)
16. Heni Marlina, *Pengaruh Global Terhadap Pembaruan Hukum Nasional, Jurnal Varia Hukum*, .2018, 39 (3), hal. 235 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Prespektif Teori Keadilan*, Semarang: Unnes Press, 2016, hal. 48 [↑](#footnote-ref-17)
18. Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana, 2012, hal. 24 [↑](#footnote-ref-18)
19. Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok:Rajawali Pers, 2019, hal. 86 [↑](#footnote-ref-19)
20. Tim Redaksi Grasindo, *Op.Cit,* hal. 784 [↑](#footnote-ref-20)
21. Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit*, hal. 87 [↑](#footnote-ref-21)
22. KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta : Kencana, Cet-ke 2, 2014, hal 183 [↑](#footnote-ref-23)
24. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Pers, Cet-ke-1, 2014, hal.27 [↑](#footnote-ref-24)
25. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hal.27 [↑](#footnote-ref-25)
26. John Rawls, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan*. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke 3 2019, hal.. 72-73. [↑](#footnote-ref-26)
27. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, hal.30 [↑](#footnote-ref-27)
28. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, cet ke-13, 2023, hal.. 96 [↑](#footnote-ref-28)
29. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogjakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-5, 2019, hal.104 [↑](#footnote-ref-29)
30. *ibid*, hal. 34 [↑](#footnote-ref-30)
31. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2018, hal. 1 [↑](#footnote-ref-31)
32. Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014, hal.1. [↑](#footnote-ref-32)
33. Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sangir Multi Usaha, 2022, hal. 14 [↑](#footnote-ref-33)
34. Hasanal Mulkan, *Buku Ajar kapita Selekta Hukum Pidana*, Palembang : NoerFikri, 2022, hal. 2 [↑](#footnote-ref-34)
35. Sudarto, *Hukum Pidana* 1, Semarang : Yayasan Sudarto, 2018, hal. 14 [↑](#footnote-ref-35)
36. Andi Sofyan dan Nur Azisa*, Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena Press, 2016, hal..3 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang : Umrah Press, 2020, hal. 3-4 [↑](#footnote-ref-37)
38. Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit,* hal. 36 [↑](#footnote-ref-38)
39. Muladi, *Penerapan Asas Retroaktif dalam hukum Pidana di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, kerjasama FakultasHukum UNDIP Semarang dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Semarang, 26-27 April 2004, hal. 4 [↑](#footnote-ref-39)
40. Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hal .82 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*, hal .84-85 [↑](#footnote-ref-41)
42. Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 2016, hal. 29. [↑](#footnote-ref-42)
43. Suyanto, *Hukum Acara Pidana, Sidoarjo* : Zifatama Zawara, 2018, hal. 87 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid.* hal. 87 [↑](#footnote-ref-44)
45. Andi Hamzah*, Op,Cit*, hal 31-32 [↑](#footnote-ref-45)
46. M.Irsan Arief, *Memahami kesalahan Penyusunan Surat dakwaan* (Studi kasus 25 Perkara Pidana), Jakarta : Mekar Cipta Lestari, 2023, hal 17 [↑](#footnote-ref-46)
47. *ibid*. hal. 17 [↑](#footnote-ref-47)
48. Febrina Annisa dan Yetisma Saini, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hal. 90 [↑](#footnote-ref-48)
49. Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta : Grasindo. 1995, hal. 93 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*, hal. 93 [↑](#footnote-ref-50)
51. Sofia Hardani, dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru : PSW UIN Sultan Syarif Kasim, 2010, hal. 8 [↑](#footnote-ref-51)
52. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok : RajaGrafindo Persada , 2019, hal. 61 [↑](#footnote-ref-52)
53. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 51. [↑](#footnote-ref-53)
54. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi,* Bandung, : Mandar Maju, 2020, hal.10 [↑](#footnote-ref-54)
55. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan*

    *Sidang Pengadilan*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika,

    Jakarta, 2003, hal.273. [↑](#footnote-ref-55)
56. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit,* hal. 13 [↑](#footnote-ref-56)
57. P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hal. 192 [↑](#footnote-ref-57)
58. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 125 [↑](#footnote-ref-58)
59. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tanggerang : Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 67 [↑](#footnote-ref-59)
60. Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Semaranag : Pustaka Magister, 2018, hal. 7 [↑](#footnote-ref-60)
61. Fitri Wahyuni, *Op.Cit,* hal. 166 [↑](#footnote-ref-61)
62. Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 167 [↑](#footnote-ref-62)
63. Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Cirebon : Djava Sinar Perkasa, 2022, hal. 30 [↑](#footnote-ref-63)
64. Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit,* hal. 33 [↑](#footnote-ref-64)
65. Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit*, hal. 39 [↑](#footnote-ref-65)
66. Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP [↑](#footnote-ref-66)